

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005



Diterbitkan : Desember 2005
Data : Januari 2004 – Desember 2004



KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KONAWE SELATAN,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ALAMAT : Jl. Poros Andoolo
Telp : (0408) 22600

KATA PENGANTAR

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Konawe Selatan 2005 memuat informasi kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta bahan pencemaran. Penyajiannya dituangkan dalam bentuk dua buah buku laporan, yaitu buku Analisis Lingkungan Hidup (buku I) dan Basis Data Lingkungan Hidup (buku II).

Buku SLHD ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi kondisi lingkungan hidup dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta bahan-bahan pencemar yang perlu diwaspadai dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu dapat pula menjadi bahan masukan dari berbagai pihak terkait, khususnya dalam merumuskan kebijaksanaan dan program-program pembangunan di bidang kependudukan dan lingkungan hidup.

Mengingat Kabupaten Konawe Selatan merupakan kabupaten yang baru terbentuk, sehingga dalam penyusunan buku SLHD ini masih terdapat berbagai keterbatasan terutama mengenai kelengkapan data serta analisis penyajiannya. Oleh karena itu, koreksi dan saran-saran perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan SLHD di masa datang.

Penyusunan SLHD Kabupaten Konawe Selatan 2005 ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Andoolo, Desember 2005
BUPATI KONAWE SELATAN

Drs. H. IMRAN, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN.....	8
2.1. Visi dan Misi Kabupaten Konawe Selatan.....	9
2.2. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	9
2.3. Kebijakan Tata Ruang	10
2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	10
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN.....	16
3.1. Kegiatan Manusia dan dampaknya	16
3.2. Kondisi lingkungan.....	39
3.3. Kegiatan Untuk Menanggulangi Perubahan Lingkungan.....	56
BAB IV. REKOMENDASI	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
3.1.	Sumber dan Beban Pencemaran Udara Kabupaten Konawe Selatan	45
3.2.	Kualitas Udara Pada Beberapa Titik Pengamatan Kabupaten Konawe Selatan	46
3.3.	Sumber dan Beban Pencemaran Air Kabupaten Konawe Selatan	47
3.4.	Kualitas Air Sungai Pada Beberapa Titik Pengamatan	49

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Contoh dua buah perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja	19
2.	Pemanfaatan sungai untuk kepentingan irigasi	21
3.	Pemanfaatan sumber daya lahan oleh masyarakat	22
4.	Contoh erosi tanah yang terjadi pada badan jalan	23
5.	Perkebunan Kakao masyarakat	24
6.	Objek wisata air terjun Moramo	26
7.	Salah satu areal perladangan berpindah	27
8.	Salah satu industri sawmil di Konawe Selatan	30
9.	Kayu bakar dan pemukiman penduduk, bentuk eksploitasi hutan mangrove	33
10.	Perkampungan nelayan dengan ikan jemur di depannya	34
11.	Budidaya kerang mutiara di desa Wawosunggu Kecamatan Moramo.....	35
12.	Bahan galian/penambangan batu gunung di Kecamatan Moramo	38
13.	Areal persawahan yang menggunakan pupuk & pestisida	43
14.	Pertigaan Punggaluku dan Terminal Pelabuhan <i>Ferry</i> Torobulu Kecamatan Lainea.	45

15. Bentuk dan Pemanfaatan TPS di Desa Potoro	49
16. Sungai Laea yang memperlihatkan kondisi air	51
17. Perusahaan Air Minum dan Sumur Umum	52
18. Kondisi hutan mangrove dilihat dari kejauhan	53
19. Tumbuhan bunga teratai di TNRAW (Doc. BTNRAW)	55
20. Jenis-jenis Fauna yang terdapat di TNRAW dan SM Tanjung Batikolo dan Tanjung Peropa	56

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Teks	Halaman
1.	Citra Land Sat Kabupaten Konawe Selatan 2003	64
2.	Peta Administrasi Kabupaten Konawe Selatan 2005	65
3.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Konawe Selatan 2005	66
4.	Peta Lereng Kabupaten Konawe Selatan 2005	67
5.	Peta Jenis Tanah	68

ABSTRAK

Kabupaten Konawe Selatan dengan luas wilayah 451.421 Ha, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 secara geografis terletak dibagian selatan katulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 3°58,56' dan 4°31,52' LS, membujur dari barat ke timur antara 121,58' dan 123,16' bujur timur, sedangkan secara Administratif Kabupaten Konawe Selatan dibatasi oleh wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lambuya, kecamatan Pondidaha, kecamatan Sampara Kabupaten Konawe serta kecamatan Baruga dan kecamatan Poasia Kota Kendari
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo
- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rumbia Kabupaten Buton serta kecamatan Lambandia dan kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Tobeas Besar Kabupaten Muna dan Selat Tiworo

Topografi wilayah Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah, yang dapat dibedakan atas 5 kelas berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yaitu 0 – 25 m (8,11%), 25-100 (31,62%), 100-500 (39,38%), 500-1000 (13,66%) dan lebih dari 1.000 (7,23%), sedangkan berdasarkan kemiringan tanah dapat dibagi menjadi: kemiringan 00-02% (seluas 30,52%), 03-15% (seluas 32,61%), 16-40% (seluas 27,33%) dan diatas 41% (seluas 9,54%). Jenis tanah terdiri atas latosol (23,35%), podzolik (28,15%), organosol (4,71%), mediteran (3,39%), aluvial (4,80%) dan tanah campuran (35,59%).

Kabupaten Konawe Selatan dilalui oleh beberapa buah sungai besar yaitu sungai Lapoa, sungai Laeya dan sungai Roraya. Sungai-sungai ini telah dimanfaatkan sebagai sumber irigasi dan telah dibangun beberapa bendungan

untuk pengembangan pertanian. Selain sungai-sungai tersebut juga terdapat banyak sungai-sungai kecil dan rawa.

Sarana dan prasarana dasar telah tersedia secara memadai kecuali sarana telekomunikasi tetapi saat ini sedang dibangun beberapa sarana telokuminikasi. Hubungan antara daerah/wilayah Kabupaten, Propinsi dapat dijangkau dengan mudah, sarana transportasi sudah tersedia dengan baik, apakah itu hubungan darat maupun hubungan laut dan udara. Kegiatan didalam perhubungan ini dapat dengan cepat mendukung kegiatan pembangunan serta perekonomian Kabupaten Konawe Selatan.

Kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Konawe Selatan adalah: (1) Angkutan darat; panjang jalan pada tahun 2004 mencapai 854.2 km, dengan kondisi baik 10.68%, sedang 35.38% dan rusak ringan 36.57% serta rusak berat 14.87%. Fasilitas angkutan darat (kendaraan roda empat) sebanyak 4.275 buah yang terdiri dari mobil umum 49.1% dan tidak umum 50,9%, sementara itu jumlah sepeda motor sebanyak 13.218 buah; (2) Angkutan laut; Di daerah ini terdapat pelabuhan very penyeberangan Torobulu Tampo, sebanyak 2 -3 kali sehari. (3) Angkutan udara melalui bandara udara Wolter Monginsidi yang berada di Kecamatan Ranomeeto, jumlah pesawat yang tiba dan berangkat sebanyak 1.482 kali.

Untuk menjangkau pelayanan informasi telah dikembangkan fasilitas pos dan sementara ini pula dikembangkan fasilitas telekomunikasi. Kantor Pos dan Giro pembantu sebanyak 7 buah, 9 unit pos keliling desa, 4 rumah pos dan 11 unit bis surat.

Hotel berbintang dan atau restoran belum berkembang di daerah ini, kecuali kategori hotel/penginapan standar sebanyak 3 perusahaan dengan 93 kamar dan 131 tempat tidur.

Kebijakan umum pembangunan lingkungan hidup di Konawe Selatan diarahkan pada upaya terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup agar

dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan tersebut bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab sektor lingkungan hidup, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab sektor pembangunan lainnya termasuk dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.

Rencana tata ruang Kabupaten Konawe Selatan diarahkan pada penataan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan faktor keseimbangan kelestarian lingkungan dan kenyamanan serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang antara kawasan terbangun dan ruang terbuka/hijau.

Dalam RUTRW kabupaten Konawe Selatan, arahan kebijakan pengembangan daerah terdiri dari 2 kebijaksanaan yaitu : Kebijaksanaan sistem perwilayahan Konawe Selatan dan Kebijaksanaan sektoral pembangunan.

Impilkasi pembangunan yang telah dilaksanakan menyebabkan aktivitas penduduk tumbuh dan berkembang pesat terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan tekanan atau berbagai macam dampak terhadap lingkungan hidup. Aktivitas/kegiatan penduduk yang menimbulkan tekanan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: (i) kependudukan; beberapa kecamatan dari sisi demografis memiliki nilai kepadatan penduduk cukup tinggi (di atas 50 jiwa/ km²), seperti pada kecamatan Landono (74,20 jiwa/km²), Ranomeeto (67,53 jiwa/km²), Tinanggea (59,58 jiwa/km²), Moramo (55,12 jiwa/km²), Angata (53,35 jiwa/km²) dan Andoolo (52,90 jiwa/km²). Konsekwensi dari wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi akan berdampak pada menurunnya daya dukung lahan dan terpusatnya pemukiman penduduk pada wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang tinggi, (ii) pertanian; mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah pertanian (80,41%) Oleh karena itu, untuk mempelancar roda perekonomian kabupaten Konawe Selatan bertumpu pada sektor pertanian, khususnya ketergantungan pada penggunaan sumberdaya

alam seperti lahan. Data penggunaan lahan untuk sektor pertanian menunjukkan adanya peningkatan, yaitu mencapai 27,94% dari total luas wilayah yang ada pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 32,96% pada tahun 2004, (iii) pemanfaatan hasil hutan; dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan mengambil kayu oleh masyarakat setempat telah berubah menjadi kegiatan mengolah kayu, ikut mendorong cepatnya proses deforestasi kawasan hutan, (iv) pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut; tekanan utama terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut (kegiatan perikanan) adalah (a) semakin menipisnya populasi hutan mangrove yang disebabkan oleh: eksploitasi hutan mangrove untuk kepentingan ekspor, pembangunan tambak rakyat, ekspansi pemukiman penduduk dan keperluan bahan bangunan dan kayu bakar (b) kerusakan terumbu karang disebabkan oleh: aktivitas penambangan (untuk kepentingan pembangunan rumah, jembatan dan pembuatan kapur), penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun/cianida), (v) pertambangan; kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, tanah longsor hilangnya vegetasi sebagai habitat beberapa jenis satwa dan perubahan pola aliran air permukaan, polusi udara, pencemaran air dan perubahan iklim mikro dan (vi) industri; kegiatan sektor industri yang paling menonjol mendorong roda perekonomian dan dapat menciptakan lapangan kerja adalah industri marmer, pengolahan hasil hutan dan industri rumah tangga skala kecil dan minuman. Keadaan ini akan memacu industri tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga disisi lain akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Selatan.

Pemanfaatan sumber daya alam masih merupakan tumpuan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan. Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang

dilaksanakan selama ini lebih mengutamakan kepada upaya mengejar perolehan keuntungan, sehingga dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga secara gradual degradasi kondisi lingkungan hidup terjadi perubahan secara signifikan seperti degradasi tanah karena tingkat erosi yang tinggi dan banyaknya sungai-sungai yang mengalami kekeringan karena rusaknya kawasan penyangga (DAS).

Salah satu penyebab utama terjadinya degradasi tanah adalah adanya kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani pada lahan yang mempunyai topografi berbukit/miring, yang tidak diukuti oleh upaya konservasi. Degradasi tanah terjadi sebagai akibat eksploitasi sumber daya hutan dan aktivitas penebangan hutan secara liar terutama pada kawasan hutan, mengakibatkan hilangnya fungsi vegetasi sebagai pelindung dan penutup tanah oleh pukulan butir hujan.

Sumber-sumber pencemaran udara yang memiliki keakuratan dan sumber data yang jelas adalah: pencemaran udara bersumber dari industri pengolahan: pengolahan makanan (tahu-tempe), pembangkit tenaga/PLTD, tungku domestik, kendaraan bermotor dan kapal motor dipelabuhan serta pesawat udara. Sedangkan sumber pencemaran air bersumber dari efluen industri pengolahan : industri kayu dan olahan kayu serta limbah domestik. Sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan; pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan (tambak dan budidaya), rumah sakit, bahan galian C dan pasar. Sampah rumah tangga di kabupaten Konawe Selatan dimusnahkan sendiri oleh masyarakat, baik dengan cara membakar, dibuang ke kebun, bahkan dibuang ke sungai/kali dan saluran-saluran drainase. Masalah limbah belum menjadi masalah utama di Konawe Selatan.

Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Laut, diperkirakan tingkat kerusakan hutan mangrove mencapai 46,21% -60,00%, kerusakan terumbu karang sudah mencapai 40-50%, sehingga sudah membutuhkan penanganan serius.

Data potensi keanekaragaman hayati yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan cukup tinggi baik untuk flora maupun fauna. di TNRAW terdapat sekitar 233 jenis fauna (meliputi 24 mamalia, 190 jenis burung, 7 jenis reptil dan 12 jenis ikan air tawar). Sedangkan fauna di Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo dan Tanjung Peropa tercatat sekitar 114 jenis (meliputi 21 jenis mamalia, 91 jenis burung, dan 2 jenis reptil). Jenis flora tercatat sekitar 425 jenis. Dari jumlah tersebut di TNRAW ditemukan sebanyak 341 jenis dan di SM Batikolo dan Tanjung Peropa ditemukan sebanyak 166 jenis. Data kondisi keanekaragaman hayati sangat kurang tersedia. Namun demikian dapat diperkirakan bahwa akibat aktivitas manusia dan kegiatan pembangunan menyebabkan terganggunya kondisi ekosistem yang selanjutnya berakibat pada hilangnya/berkurangnya keragaman hayati (*Biodiversity*). Aktivitas yang paling erat berkaitan dengan hal tersebut adalah kegiatan pertanian dan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, perusakan habitat, pencemaran, dan adanya konversi habitat alam kepenggunaan lain.

Paradigma baru pembangunan global tidak lagi melulu didasarkan pada aspek ekonomi untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Paradigma baru pembangunan global meyakini bahwa selain aspek ekonomi, yang tak kalah pentingnya adalah sejauhmana suatu negara mampu memelihara kelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH) negaranya ketika melaksanakan pembangunan. Hal ini sebagaimana draft rumusan PBB tentang hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai HAM generasi ketiga, setelah hak-hak sipil dan politik (sipil) dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*ecosoc*) yang dikenal sebagai HAM generasi pertama dan kedua.

Berdasarkan konsep pembangunan moderen, setidaknya ada tiga dimensi pokok yang harus diperhatikan dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Konsep pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan tiga dimensi ini dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan pembangunan yang berwawasan lingkungan (*eco-development*). Menurut konsep ini, yang dipertahankan keberlanjutan dan eksistensinya bukan hanya menyangkut variabel-variabel pembangunan yang dikenal selama ini (sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, serta kelembagaan dan keterampilan manajerial), melainkan juga proses interaksi antara variabel-variabel tersebut. Dinamika interaksi variabel-variabel tersebut harus tetap berjalan secara proporsional, jika berbagai kesenjangan dan stagnasi pembangunan tidak signifikan.

Konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan mengacu kepada kesepakatan bahwa upaya pembangunan untuk

memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masa kini dilaksanakan tanpa harus mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Dengan demikian, konsep pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia dengan tetap mewaspadaikan agar tidak mengganggu dan melampaui kemampuan ekosistem yang menunjang kehidupan. Kesepakatan ini sebagaimana dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDG) atau Tujuan Pembangunan Global.

Selain itu, konsep ini menganut prinsip bahwa pembangunan suatu negara tidak bisa lagi memisahkan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan sosial ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup merupakan prinsip dasar yang harus melandasi setiap keputusan dan kebijakan pemerintah seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, komitmen untuk mewujudkan prinsip tersebut telah dituangkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, diantaranya adalah UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih belum secara konsisten dan konsekwen menerapkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MDG di atas. Ketidakkonsistenan tersebut nampak dalam berbagai bidang pembangunan dan terjadi dalam skala nasional maupun daerah, termasuk Konawe Selatan.

Kabupaten Konawe Selatan merupakan kabupaten baru, merupakan pemekaran dari kabupaten Kendari (Konawe) dengan luas wilayah 451.421 ha, yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003, dan resmi definitif tanggal 2 Mei 2003.

Kabupaten Konawe Selatan dengan ibu kota Andoolo secara geografis terletak di bagian selatan garis Katulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 3°58,56' dan 4°31,52' Lintang Selatan, membujur dari barat ke timur antara 121,58' dan 123,16' Bujur Timur, yang berjarak sekitar 83 km dari kota Kendari (ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara). Kabupaten Konawe Selatan memiliki letak geografis yang strategis dan

dapat diakses dengan mudah baik melalui jalur darat, laut maupun udara dari sebagian besar kabupaten-kabupaten lain yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara serta dari provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Secara administratif, kabupaten Konawe Selatan dibatasi oleh wilayah:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lambuya, kecamatan Pondidaha, kecamatan Sampara Kabupaten Konawe serta kecamatan Baruga dan kecamatan Poasia kota Kendari.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Tiworo.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rumbia kabupaten Buton serta kecamatan Lambandia dan kecamatan Ladongi kabupaten Kolaka.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan pulau Tobeas Besar kabupaten Muna dan Selat Tiworo.

Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas 11 kecamatan definitif dan 297 desa/kelurahan. Beberapa kecamatan dari sisi demografis memiliki nilai kepadatan penduduk cukup tinggi (di atas 50 jiwa/ km²), seperti pada kecamatan Landono (74,20 jiwa/km²), Ranomeeto (67,53 jiwa/km²), Tinanggea (59,58 jiwa/km²), Moramo (55,12 jiwa/km²), Angata (53,35 jiwa/km²) dan Andoolo (52,90 jiwa/km²). Konsekuensi dari wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi akan berdampak pada menurunnya daya dukung lahan dan terpusatnya pemukiman penduduk pada wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang tinggi. Aktivitas penduduk pada kawasan pemukiman yang relatif padat dapat menghasilkan limbah rumah tangga dan domestik yang cukup tinggi. Limbah rumah tangga dan domestik yang tidak terkelola dan dibuang di sembarang tempat akan berdampak pada semakin merosotnya kondisi lingkungan hidup, meskipun sampai saat ini hal tersebut belum memberikan dampak yang berarti terhadap kondisi lingkungan hidup.

Mata pencaharian utama penduduk kabupaten Konawe Selatan adalah pertanian (80,41%) termasuk di dalamnya perkebunan, kehutanan

dan perikanan, jasa dan keuangan (8,1%), perdagangan (5,98%) dan pertambangan/penggalian dan industri (3,14%). Usaha-usaha pertanian yang dikembangkan di kabupaten Konawe Selatan sebagian besar masih bersifat tradisional yang menggandalkan kesuburan alami tanah, sehingga ketika produksi mulai turun maka lahan tersebut ditinggalkan dan mencari lahan baru (*shifting cultivation*) yang mengarah pada kawasan hutan. Konsekwensi dari keadaan seperti ini berdampak pada semakin maraknya perambahan kawasan hutan, dan sampai saat ini luas kawasan terambah mencapai 127.482 ha atau 30.26 % per tahun.

Rusaknya hutan akibat perambahan kawasan dan *illegal logging*, merupakan isu utama lingkungan hidup di kabupaten Konawe Selatan. Berkembangnya usaha penggergajian hutan kayu (*sawmill*) semakin mempercepat kerusakan hutan yang berdampak pada kondisi DAS semakin kritis, sungai-sungai utama banyak mengalami kekeringan (penurunan debit air secara drastis) pada musim kemarau dan banjir besar pada musim hujan.

Disamping itu, aktivitas manusia dan pembangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu semakin banyak memberikan tekanan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup. Tekanan-tekanan tersebut telah memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan hidup (dan juga merupakan salah satu lingkungan hidup) yaitu kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut. Hal ini terjadi akibat pengelolaan mangrove dan terumbu karang yang dilakukan oleh oknum tertentu dan masyarakat, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal, untuk kepentingan ekspor, pasar maupun domestik. Kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut ini dapat dilihat dengan semakin menipisnya kondisi sumber populasi hutan mangrove di berbagai wilayah pesisir di Konawe Selatan. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun (seperti, sianida) dapat merusak terumbu karang dan habitat ikan. Hal ini terjadi akibat ketidakberdayaan masyarakat memperoleh teknologi tangkap

moderen, buruknya mentalitas masyarakat, serta lemahnya aparat penegak hukum di laut. Walau intensitas penangkapan ikan yang merusak ini masih rendah tetapi kemungkinan untuk meningkat terus terbuka apabila ketiga faktor tersebut di atas tidak mampu diselesaikan. Penangkapan ikan yang merusak ini nampak dari perilaku sebagian nelayan yang menggunakan bom dalam menangkap ikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketengahkan isu-isu lingkungan yang utama di kabupaten Konawe Selatan, yaitu:

Pertama, kerusakan hutan, yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah baik secara legal maupun ilegal. Penurunan kondisi hutan ini ditandai dengan semakin menipisnya hutan alam maupun hutan buatan.

Kedua, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang terjadi sebagai akibat dari penebangan liar (*illegal logging*) dan konversi hutan menjadi lahan pertanian yang dilakukan oleh para pihak yang kepentingannya semakin intensif terhadap pemanfaatan sumber daya hutan. Kerusakan DAS dapat dilihat dengan semakin rusaknya areal hutan baik pada bagian hulu, tengah maupun hilir, besar maupun kecil, serta semakin menurunnya debit air sungai. Pada musim kemarau, beberapa sungai bahkan sudah mengalami kekeringan.

Ketiga, kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut, yang terjadi terjadi sebagai akibat dari pengelolaan mangrove dan terumbu karang yang dilakukan oleh oknum tertentu dan masyarakat, baik secara legal maupun ilegal, untuk kepentingan ekspor, pasar maupun domestik. Kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut ini dapat dilihat dengan semakin menipisnya kondisi populasi hutan mangrove di berbagai wilayah pesisir di Konawe Selatan. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun (sianida) dapat merusak terumbu karang dan habitat ikan. Hal ini terjadi akibat ketidakberdayaan masyarakat memperoleh dan mengaplikasikan teknologi tangkap moderen, buruknya mentalitas masyarakat, serta

lemahnya aparat penegak hukum di laut. Walau intensitas penangkapan ikan yang merusak ini masih rendah tetapi kemungkinan untuk meningkat terus terbuka apabila ketiga faktor tersebut di atas tidak mampu diselesaikan. Penangkapan ikan yang merusak ini nampak dari perilaku sebagian nelayan yang menggunakan bom dalam menangkap ikan.

Keempat, penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan penyelundupan kayu (illegal logging) yang lemah. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan dan kesengajaan aparat pemda dan penegak hukum dengan melakukan pembiaran terhadap para pelaku *illegal logging*. Bahkan dalam beberapa kasus, oknum-oknum pemda dan aparat penegak hukum turut terlibat dalam melancarkan proses *illegal logging (legal crime)*. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* ditandai dengan kenyataan bahwa aparat pemda dan penegak hukum tidak pernah serius menangani proses hukum dan mengajukannya ke pengadilan. Bahkan sekalipun ada penanganan hukum terhadap para pelaku, hanya dilakukan kepada pelaku kelas bawah yaitu masyarakat, sementara terhadap pelaku utama dibiarkan.

Menyimak berbagai masalah tersebut, maka sudah saatnya kebijakan, strategi, dan rencana aksi (*action plan*) pengelolaan lingkungan hidup di Konawe Selatan harus disusun secara terpadu dengan melibatkan semua stakeholder. Kecenderungan yang terjadi selama ini, pengelolaan lingkungan hidup sepenuhnya dikontrol oleh pemerintah dan dalam rencana pengelolaannya masih bersifat etik. Perencana pembangunan cenderung berasumsi bahwa hanya merekalah yang lebih tahu terhadap proses perencanaan, sehingga dirasa tidak perlu menyertakan pihak lain. Dalam membuat perencanaan juga lebih banyak mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan budaya lokal.

Perencanaan terpadu menghendaki adanya keterlibatan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Dengan adanya keterlibatan semua pihak terkait secara

kolektif, maka pengelolaan SDA dan LH terpadu dapat menyerap keinginan, nilai, dan idealisme dari berbagai stakeholder yang ada dalam suatu wilayah, sehingga akan lebih menjamin keberlanjutan dari pembangunan wilayah dimaksud. Selain itu, perencanaan terpadu juga dapat menangani permasalahan LH secara holistik dan komprehensif, sehingga seluruh potensi yang ada dalam sebuah wilayah dapat dikelola dan ditangani secara bijaksana.

Untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup di kabupaten Konawe Selatan, baik yang berkaitan dengan kondisi bio-fisik, sosial-ekonomi, maupun kegiatan manusia yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap manusia, maka kantor Lingkungan Hidup kabupaten Konawe Selatan menyusun buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).

BAB II

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, seperti ditetapkan dalam pasal 28H dan 33 UUD 1945. pasal 28H ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-2 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Senada dengan hal itu, pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, keberlanjutan, dan manfaat mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis.

2.1. Visi Dan Misi Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah dan sejalan dengan tuntutan pembangunan di era reformasi yang transparan, *accountable* dan konsep otonomi daerah maka kabupaten Konawe Selatan memiliki Visi: Memupuk Kebersamaan Membangun Konawe Selatan Menuju Masyarakat Sejahtera, dan Misi: (i) menyediakan dan meningkatkan infrastruktur fisik pemerintah dan masyarakat (ii) meningkatkan kinerja ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sektor ekonomi unggulan (iii) memupuk sebuah masyarakat demokratis, bermoral dan beretika (iv) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang berilmu pengetahuan (v) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan (vi) menciptakan pemerintah yang baik, bersih dari KKN, efektif dan efisien.

2.2. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Daerah

Kebijakan umum pembangunan LH di Konawe Selatan diarahkan pada upaya terwujudnya pelestarian fungsi LH agar dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan tersebut bukan semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab sektor LH, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab sektor pembangunan lainnya termasuk dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu Kebijaksanaan di bidang PSDA dan LH menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Pengembangan dan peningkatan akses informasi SDA dan LH
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi SDA
3. Pengendalian pencemaran, rehabilitasi dan recovery kualitas LH
4. Penyuluhan penegakan hukum dan penguatan institusional
5. Pendidikan dan latihan bagi aparatur pengelolah SDA dan LH
6. Penyehatan lingkungan kota, pemukiman dan pembinaan usaha kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan
7. Peningkatan fasilitas aparatur pengelolah SDA dan LH

2.3. Kebijakan dan Pelaksanaan Tata Ruang

Dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka pada perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan terdapat bagian yang menangani tentang Tata Ruang. Rencana tata ruang Kabupaten Konawe Selatan diarahkan pada penataan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan faktor keseimbangan kelestarian lingkungan dan kenyamanan serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang antara kawasan terbangun dan ruang terbuka/hijau. Dalam penegakkan aturan tata ruang sebagai salah satu instrumen hukum dalam pengelolaan lingkungan banyak mengalami kendala akibat: (1) adanya persebaran penduduk yang tidak merata dan cenderung terpusat dipusat-pusat kegiatan tertentu (2) pesatnya perkembangan kegiatan komersial secara *linier* sepanjang ruas-ruas jalan arteri atau pusat-pusat pemukiman yang kemudian hari potensial menimbulkan masalah tumbuhnya lingkungan kumuh dan sebagainya, (3) Sejalan dengan perkembangan fisik Wilayah kabupaten Konawe Selatan yang secara keseluruhan mengakibatkan penyebaran konsentrasi penduduk kabagian-bagian kota yang dikembangkan ternyata tidak diikuti oleh penyediaan fasilitas yang memadai dan masalah-masalah lainnya.

2.4. Arahan Kebijakan Pengembangan Daerah

Dalam RUTRW kabupaten Konawe Selatan, arahan kebijakan pengembangan daerah terdiri dari 2 kebijaksanaan yaitu :

- Kebijaksanaan sistem perwilayahan Konawe Selatan
- Kebijaksanaan sektoral pembangunan

2.4.1. Kebijaksanaan Sistem Perwilayahan Konawe Selatan

Tujuan dari kebijaksanaan ini adalah :

- a. Mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah agar jurang perbedaan tingkat kemakmuran antar daerah yang maju dengan daerah terbelakang dapat dikurangi.

- b. Mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang terdapat di daerah serta disesuaikan dengan prioritas daerah baik bagi kepentingan perkembangan regional maupun bagi kepentingan daerah sendiri.
- c. Mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan antar wilayah dalam hal ini menyangkut tingkat kemampuan wilayah, sehingga terjadi ikatan-ikatan (ekonomi, sosial, budaya dan hankamnas) yang kuat di dalam suatu kerangka kesatuan ekonomi nasional yang kokoh.
- d. Mengembangkan wilayah-wilayah minus, daerah-daerah perbatasan dan tanah-tanah minus melalui program khusus.

Dalam kebijaksanaan perwilayahan Konawe Selatan, terbagi menjadi beberapa satuan wilayah pembangunan (SWP) Kabupaten. Selanjutnya setiap satuan wilayah pembangunan kabupaten terdiri dari beberapa sub satuan wilayah pembangunan (Sub-SWP). Konawe Selatan, terbagi menjadi 4 SWP, yaitu :

1. SWP I meliputi : Kecamatan Andoolo, Tinanggea
2. SWP II meliputi : Kecamatan Lainea, Palangga dan Konda
3. SWP III meliputi : Kecamatan Morami, Laonti dan Kolono
4. SWP IV meliputi : Kecamatan Landono, Angata dan Ranomeeto

Potensi dari SWP I,II,III dan IV ini adalah hutan dan pertanian (persawahan serta perkebunan), selain itu sektor perdagangan, jasa dan industri kecil serta pendidikan juga memiliki potensi yang cukup besar.

Potensi-potensi yang ada harus mampu dikembangkan dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti transportasi, fasilitas umum, dan utilitas wilayah.

2.4.2. Kebijakan Sektor Pembangunan

a. Bidang Ekonomi

Kebijakan di bidang ekonomi menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis, meliputi :

1. Meningkatkan produksi dan ketersediaan beras secara berkesinambungan untuk mendukung program swasembada pangan, keragaman pangan dan ketahanan pangan
2. Pengembangan pola distribusi pangan yang memberikan jaminan akses pangan terhadap masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga
4. Pengembangan semua sub sektor agribisnis dalam pengejawantahan prinsip adu serasi
5. Berkembangnya usaha-usaha bergerak dibidang agribisnis.

b. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Pendidikan dasar dan pra sekolah
2. Peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dasar
3. Pendidikan menengah mencakup peningkatan pemerataan, mutu, relevansi dan penataan sistem kelembagaan pendidikan menengah
4. Pembinaan pendidikan luar sekolah dan program pendidikan tinggi
5. Pemerataan dan peningkatan mutu fasilitas pendidikan
6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan tujuan memutuskan mata rantai penularan penyakit, menurunkan morbiditas dan mortalitas
7. Pemberantasan penyakit, terutama yang menyerang bayi, balita dan ibu dengan cakupan usaha antara lain akses pelayanan ibu hamil,

mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, deteksi resiko tinggi kehamilan oleh petugas medis. Sedangkan untuk bayi adalah pelayanan kesehatan neonatal, pelayanan kesehatan dan deteksi tumbuh kembang balita.

c. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Kebijaksanaan di bidang fisik sarana dan prasarana menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Rehabilitasi transportasi jalan
2. Peningkatan dan pengembangan transportasi jalan
3. Peningkatan fasilitas fisik pelabuhan
4. Pengembangan penunjang transportasi
5. Pengembangan, pendayagunaan dan pengelolaan pengairan
6. Konservasi dan rehabilitasi sumber daya air
7. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam
8. Peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air

d. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijaksanaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencari masukan dan referensi dalam pengembangan kebijakan serta penyempurnaan kelembagaan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas aparatur negara melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
2. Pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dasar.
3. Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM).
4. Meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan aparatur.
5. Peningkatan dan pembangunan fasilitas telekomunikasi dengan jaringan fisik PT. Telkom.

6. Membina hubungan dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

e. Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

Kebijaksanaan di bidang sosial budaya dan pariwisata menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Pemasaran wisata dan pengembangan produk wisata pada obyek-obyek potensial wisata yang mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
2. Pendidikan, latihan, pendidikan penyuluh dan pelayanan pariwisata, khususnya pada *Community Based Social Organization (CBSO)* atau berbasis masyarakat.
3. Penelitian dan pengembangan pariwisata melalui pembangunan pusat informasi pariwisata.
4. Pembangunan prasarana pariwisata seperti penginapan, losmen, hotel dan sejenis.
5. Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan melalui pembinaan tradisi, pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala serta kemuseuman.

f. Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Kebijaksanaan di bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum meliputi pemberian kepastian hukum dan melaksanakan penyuluhan sadar hukum.
2. Penyuluhan dan pembentukan hukum yang secara operasional mencakup peningkatan kualitas dan kinerja peran serta fungsi anggota legislatif, utamanya dalam merumuskan dan membentuk hukum (perda) sesuai dengan pokok-pokok fungsi legislatif itu sendiri.

3. Pemberdayaan lembaga peradilan yang bebas dari segala bentuk intervensi kekuasaan lain dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat.

g. Bidang Pemerintahan

Kebijaksanaan di bidang pemerintahan menitikberatkan dan diarahkan pada program pembangunan :

1. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan mencakup menyempurnakan struktur dan mekanisme kerja kelembagaan negara dan pemerintahan serta penyelenggaraan sistem administrasi dan kearsipan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas SDM meliputi kualitas aparatur negara dengan meningkatkan taraf kesejahteraan dan profesionalisme serta penerapan sistem karir berdasarkan prestasi sekaligus mencegah terjadinya tindak KKN.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur berkualitas dan profesional dalam pemberian pelayanan terhadap publik.
4. Pengawasan aparatur pemerintah mencakup efektivitas pengawasan internal maupun fungsional terhadap kinerja aparatur negara dan pemerintahan.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pemerintahan baik sebelum maupun sesudah memangku jabatan, namun tetap menjunjung tinggi hak hukum dan HAM.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan aparatur negara sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

BAB III

ANALISIS ISU LINGKUNGAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN

Analisis isu lingkungan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan di kabupaten Konawe Selatan, dilakukan melalui pendekatan Tekanan-Status-Respon (*Pressure-State-Response/P-S-R*) yang meliputi gambaran umum lingkungan dari tiga sudut pandang, yaitu (1) kegiatan manusia yang menimbulkan tekanan pada lingkungan, seperti kegiatan pertanian, industri, pertambangan, perikanan dan lain-lain; (2) kondisi lingkungan seperti bahan kimia beracun, polusi udara dan air, degradasi tanah, hilangnya beberapa jenis biodiversity; (3) kegiatan untuk menanggulangi perubahan lingkungan, seperti kebijakan pemerintah dan respon masyarakat.

3.1. Kegiatan Manusia yang Menimbulkan Tekanan pada Lingkungan

Implikasi pembangunan yang telah dilaksanakan menyebabkan aktivitas penduduk tumbuh dan berkembang pesat terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dapat menimbulkan tekanan atau berbagai macam dampak terhadap lingkungan hidup. Aktivitas/kegiatan penduduk yang menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

3.1.1. Penduduk

Penduduk Konawe Selatan pada tahun 2004 berjumlah 229.559 jiwa terdiri 118.415 laki-laki dan 111.114 perempuan dengan rasio 106,5. dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2003, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak 3.791 jiwa, meliputi 1.118 jiwa laki-laki dan 1.903 perempuan.

Persebaran penduduk hampir merata di semua wilayah kecamatan dengan konsentrasi penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tinaggea sebanyak 32.312 jiwa pada tahun 2004 dan 31.729 jiwa pada tahun 2003. Sedangkan, konsentrasi penduduk paling kecil terdapat di kecamatan Laonti sebesar 8.978 jiwa pada tahun 2004 dan 8.706 jiwa pada tahun 2003. Pada semua wilayah kecamatan terjadi penambahan penduduk secara merata dan wajar.

Tingkat kepadatan penduduk merata pada semua wilayah kecamatan. Kepadatan penduduk Konawe Selatan yaitu 51,73 jiwa/km². Kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Landono yaitu 79,9 jiwa/Km² atau 3,9 KK/km². Sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Laonti 25,2 jiwa/km² atau 4,7 KK/km².

Dari segi jenis kelamin, perbandingan antara laki-laki dan perempuan juga merata pada semua wilayah kecamatan. Rasio antara laki-laki dan perempuan secara umum yaitu 98,2 jiwa/km². Rasio paling tinggi terdapat di kecamatan Tinanggea yaitu 109,1, sedangkan terendah adalah di kecamatan Lainya yaitu 103,0. Berdasarkan kategori usia penduduk di Konawe Selatan paling tinggi adalah kategori penduduk usia adalah usia 0-4 tahun yaitu 28.398 jiwa, sedangkan terendah usia 65 tahun ke atas yaitu 5.502 jiwa. Kategori usia produktif yaitu 15 – 59 tahun sebanyak 138.561 jiwa.

Sementara itu tingkat pertumbuhan penduduk di Konawe Selatan masih berjalan secara alamiah oleh karena kelahiran dan migrasi skala kecil. Berdasarkan data yang ada angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,5-2,5% per tahun. Walau tingkat pertumbuhan penduduk ini tergolong rendah, namun tidak mustahil di masa datang masalah kependudukan akan menjadi masalah utama bagi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Saat ini terdapat kecenderungan pada **beberapa wilayah kecamatan tertentu** memiliki nilai kepadatan penduduk cukup tinggi (diatas 50 jiwa/ km²), seperti pada kecamatan Lanodono (74,20 jiwa/km²), Ranomeeto (67,53 jiwa/km²), Tinanggea (59,58 jiwa/km²),

Moramo (55,12 jiwa/km²) Angata (53,35 jiwa/km²) dan Andoolo (52,90 jiwa/km²). Konsekuensi dari wilayah yang memiliki kepadatan relatif tinggi akan berdampak pada rendahnya daya dukung lahan dan terpusatnya pemukiman penduduk pada wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang tinggi. Aktivitas penduduk pada kawasan pemukiman yang relatif padat, dapat menghasilkan limbah rumah tangga dan domestik yang cukup tinggi. Limbah rumah tangga dan domestik yang tidak terkelola dan dibuang di sembarang tempat akan berdampak pada semakin merosotnya kondisi lingkungan hidup, meskipun sampai saat ini, hal tersebut belum memberikan dampak yang berarti terhadap kondisi lingkungan hidup.

Dari struktur penduduk menurut angkatan kerja Konawe Selatan memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar, hal ini didasarkan pada data tahun 2004. Data pada tahun tersebut menunjukkan jumlah angkatan kerja yang sangat besar yaitu 231.685 orang, yang terdiri 143.633 orang laki-laki dan 88.052 orang perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, yang telah bekerja lebih banyak yaitu 206.097 orang dibandingkan dengan yang belum bekerja yaitu 25.588 orang.

Di lain pihak, penduduk yang bukan angkatan kerja terdistribusi dalam beberapa kelompok, yaitu sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain. Kategori bukan angkatan kerja yang sementara mengenyam pendidikan (sekolah) sebesar 64.477 orang, mengurus rumah tangga 46.105 orang dan lain-lain 13.080 orang.



Sumber : PPLH UNHALU, 2005

Gambar 1. Contoh dua buah perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja

Penduduk usia kerja di Konawe Selatan terdistribusi ke dalam berbagai lapangan pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2004, lapangan usaha pertanian merupakan penyerap tenaga kerja paling besar yakni 142.562 orang, terdiri 92.283 orang laki-laki dan 50.279 orang perempuan. Selanjutnya adalah lapangan usaha perdagangan yakni 20.966 orang, terdiri 8.753 orang laki-laki dan 12.213 orang perempuan. Lapangan usaha yang paling kecil menyerap tenaga kerja adalah sektor keuangan yakni 143 orang yang keseluruhannya adalah laki-laki.

Dari segi pendidikan, angkatan kerja di Konawe Selatan terdistribusi ke dalam beberapa jenjang pendidikan, di antaranya SLTA, DIII dan S1. Jumlah tertinggi yaitu jenjang pendidikan DIII sebanyak 1.195 orang, SLTA 1.606 orang dan S1 1.603 orang. Sementara itu angkatan kerja paling kecil adalah dengan jenjang pendidikan SLTP sebanyak 71 orang, SD 4 orang dan S2 yaitu 1 orang.

3.1.2. Pertanian

Mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Konawe Selatan adalah pertanian (80,41%) Oleh karena itu, untuk memperlancar roda perekonomian kabupaten Konawe Selatan bertumpu pada sektor pertanian, khususnya ketergantungan pada penggunaan sumberdaya alam seperti lahan. Data penggunaan lahan untuk sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) kabupaten Konawe Selatan menunjukkan adanya peningkatan, yaitu mencapai 27,94% dari total luas wilayah yang ada pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 32,96% pada tahun 2004.

Kegiatan pertanian yang menimbulkan tekanan penting terhadap lingkungan meliputi pertanian lahan basah (persawahan) dan pertanian lahan kering. Sedangkan kegiatan perkebunan meliputi pengembangan perkebunan kakao, jambu mete, dan tebu baik oleh masyarakat maupun oleh pihak swasta.

Kegiatan pertanian lahan basah (budidaya padi sawah) dilakukan oleh penduduk di beberapa lokasi di kabupaten Konawe Selatan, terutama pada daerah-daerah beririgasi. Pengembangan usaha pertanian irigasi terutama terdapat di kecamatan Lainea, dan sebagian di kecamatan Kolono, Konda, Moramo dan Landono. Secara khusus, pengembangan sawah beririgasi di Konawe Selatan dilakukan pada daerah rawa dan juga merupakan areal hutan sagu. Daerah rawa ini merupakan daerah penyangga, ketika berubah fungsi menjadi areal persawahan maka fungsinya juga berubah akibatnya banjir sering terjadi. Pembukaan sawah secara besar-besaran di Kecamatan Konda dan Ranomeeto, menyebabkan sering terjadinya banjir di daerah sekitarnya, karena rawa tidak mampu lagi berfungsi sebagai buffer zone dalam menampung air hujan.

Pemanfaatan sungai untuk kebutuhan irigasi seperti Sungai Laea di Kecamatan Lainea digunakan sebagai sumber pengairan bendungan Laea yang mengairi areal persawahan seluas 100 ha meliputi desa

Ambalodangge dan kelurahan Punggaluku; Sungai Landa'i di Desa Lainea digunakan sebagai sumber pengairan areal persawahan seluas lebih kurang 50 ha, Sungai Windo dimanfaatkan sebagai sumber pengairan/irigasi bagi 230 ha areal persawahan di desa Panganjaya, akibatnya air sungai tercemar oleh berbagai jenis bahan kimia seperti berbagai jenis pupuk dan pestisida yang berasal dari areal persawahan.



Sumber : PPLH UNHALU, 2005

Gambar 2. Pemanfaatan sungai untuk kepentingan irigasi

Kegiatan pertanian lainnya adalah pertanian lahan kering yang dilakukan oleh penduduk di beberapa lokasi baik pada areal lahan milik maupun pada lokasi hutan negara. Kegiatan pertanian yang dilakukan pada areal lahan milik merata terdapat di semua wilayah kecamatan di Konawe Selatan. Sedangkan pengembangan kegiatan pertanian lahan kering yang dilakukan pada areal hutan negara terdapat di Kecamatan Moramo, Kecamatan Lainea, Kecamatan Kolono dan sebagian Kecamatan Konda. Jenis-jenis tanaman pertanian lahan kering yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah jagung, jahe, kedelei dan jenis-jenis tanaman hortikultura lainnya.



Sumber : PPLH UNHALU, 2005

Gambar 3. Pemanfaatan sumber daya lahan oleh masyarakat

Penduduk/petani Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang rendah dalam hal berusaha tani dan umumnya masih melangsungkan sistem peladang berpindah. Kegiatan perladangan berpindah (*shifting cultivation*) khususnya dilakukan oleh masyarakat Tolaki. Perladangan berpindah pada masyarakat Tolaki tersebut dikenal dengan istilah *monda'u* yakni suatu bentuk usaha perladangan berpindah yang dilakukan dengan membuka hutan untuk kemudian ditanami. Kegiatan perladangan berpindah ini dilakukan oleh penduduk dalam kawasan hutan dengan kemampuan membuka ladang berpindah seluas 5 – 10 Ha. Areal perladangan ini hanya ditanami sekali musim tanam saja setelah itu ditinggalkan beberapa lama (bera), kemudian membuka laha baru lagi, karena aktivitas pertanian yang berlangsung tidak diikuti oleh penerapan teknologi budidaya yang memadai atau tanpa ada upaya konservasi meskipun usaha tani berlangsung pada kondisi tanah kritis atau pada kawasan DAS. Keadaan seperti ini akan mempercepat menurunnya kondisi kesuburan tanah dan meningkatnya erosi serta terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Secara kuantitatif, data-data bencana itu memang tidak ada tetapi secara kualitatif dapat ditunjukkan berdasarkan hasil survey tahun 2005. Dari hasil survey dimaksud, bencana banjir sering terjadi dimusim penghujan akibat meluapnya air sungai yang meliputi Sungai Windo, Manumohewu dan Sungai Laea. Kebakaran hutan sering terjadi di Gunung Puu Wewu dan Gunung Monggaria terjadi pada musim kemarau hampir setiap tahun dan longsor terjadi di Gunung Wolasi dan Gunung Moramo akibat penambangan batu gunung. Dari sekian bencana lingkungan hidup skala kecil yang disebutkan tersebut, tidak menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Kecuali itu dampak negatif yang ditimbulkannya adalah kerusakan tanaman padi sawah dan perkebunan masyarakat, serta rumah tertimbun lumpur.

Bencana kekeringan sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya pada musim kemarau. Sebagai contoh di Desa Moline—salah satu pusat pengembangan jati di Kecamatan Lainea, kekeringan tidak saja dirasakan pada musim kemarau tetapi juga pada musim penghujan. Di desa ini hanya terdapat satu sumber mata air saja yang dimanfaatkan bagi seluruh penduduk desa yang letaknya diperkirakan 3 KM dari perkampungan.



Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 4. Contoh erosi tanah yang terjadi pada badan jalan
(Lokasi : Depan kompleks perkantoran di Andoolo)

Kegiatan perkebunan juga merupakan salah satu kegiatan manusia yang menimbulkan tekanan penting terhadap lingkungan di Konawe Selatan. Kegiatan perkebunan masyarakat tidak dilakukan secara profesional, tetapi bila hanya ada kesempatan atau sisa waktu bekerja di ladang atau pekerjaan lainnya. Dengan demikian kegiatan perkebunan masyarakat nampak kurang produktif dalam arti ekonomi. Kegiatan perkebunan seperti nampak merata terdapat di semua wilayah kecamatan di Konawe Selatan.

Sementara itu kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh pihak swasta meliputi:

1. Pengembangan tanaman jambu mete di Kecamatan Lainya. Kondisi perkebunan ini sekarang sudah tidak terolah dengan baik dan pada beberapa lokasi perkebunan ini sudah dikelola oleh masyarakat dan digantikan dengan tanaman lain.
2. Pengembangan tanaman tebu di Kecamatan Angata. Kondisi perkebunan ini sekarang sudah berhenti, akibatnya areal lokasi perkebunan tersebut menjadi terlantar. Kegiatan perkebunan tebu ini hanya melakukan tahap pembersihan lahan hutan dan perkebunan rakyat (*land clearing*) serta pembibitan.



Sumber : LD Afa, 2005

Gambar 5. Perkebunan kakao masyarakat

Perluasan areal pertanian bagi penduduk, mengarah pada perambahan kawasan hutan khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Landono, Ranomeeto, Tinanggea, Moramo dan Angata

Salah satu akibat yang dapat terjadi dibalik meningkatnya kerusakan hutan tersebut adalah berkurangnya daya dukung lahan untuk kegiatan pertanian. Fenomena ini terlihat dengan terus bertambahnya lahan kritis, meningkatnya laju erosi, serta maraknya pembukaan kawasan lindung dan kawasan konservasi untuk kegiatan pertanian. Penanganan terhadap kerusakan tanah pertanian menjadi sangat penting karena produktivitas tanah dipastikan akan semakin menurun dengan terus meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan pangan, sandang dan tempat tinggal.

Di masa datang, tekanan terhadap lahan pertanian diperkirakan akan semakin meningkat akibat tingginya kehilangan hara tanaman yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain erosi, leaching, dan terbawa pada saat panen disatu sisi dan rendahnya pengetahuan petani tentang input teknologi budidaya ramah lingkungan atau sistem pertanian konservasi, maka kebutuhan akan lahan terus bergeser pada lahan-lahan yang ada dalam kawasan hutan.

Keadaan seperti ini akan terus terjadi dan jika hal ini dibiarkan, maka proses deforestasi sebagaimana yang sedang berlangsung akan lebih cepat lagi menghabiskan hutan yang masih tersisa. Pada akhirnya nanti, akan terjadi degradasi hutan yang kian parah, menjadikan DAS semakin kritis. Berkurangnya kemampuan fungsi hutan sebagai penata air tanah (*hidro-orologis*), ini sudah nampak di Konawe Selatan seperti terjadi bencana banjir atau meluapnya air di musim hujan dan bencana kekeringan di musim kemarau. Selain itu, obyek wisata juga terancam keberadaanya seperti wisata Air Terjun Moramo, karena eksploitasi hutan di daerah hulu air terjun sebagai lahan pertanian.



Sumber : LD Afa, 2005

Gambar 6. Obyek wisata air terjun Moramo

Setelah dilarangnya kegiatan perladangan berpindah dan datangnya era Proyek Reboisasi dan HTI, dalam batas-batas tertentu, kegiatan perladangan berpindah tetap dapat dilakukan oleh masyarakat. Perbedaannya terletak pada luas kawasan hutan dan lokasi areal perladangan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Di era Proyek Reboisasi dan HTI luas dan lokasi kawasan hutan yang akan dikelola ditentukan oleh proyek. Sehingga dengan sendirinya kegiatan perladangan berpindah masyarakat menjadi sangat terbatas.



Sumber : Biphut Sultra, 2005

Gambar 7. Salah satu areal perladangan berpindah

Kini, kegiatan perladangan berpindah masih dilakukan oleh masyarakat secara swadaya di luar Proyek Reboisasi dan HTI. Tetapi walau dilakukan secara swadaya seperti dahulu, luas areal perladangan yang dikelola oleh masyarakat sudah sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pelarangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat hanya membuka areal perladangan dengan luasan yang tidak terlalu mencolok. Kegiatan perladangan berpindah dilakukan oleh beberapa peladang saja dan terdapat di Kecamatan Palangga, Kecamatan Konda dan Kecamatan Kolono.

3.1.3. Pemanfaatan Hasil Hutan

Bagi penduduk yang bermukim dekat kawasan hutan maka sebagian besar aktivitasnya terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup banyak tergantung pada hasil hutan. Merotan adalah salah satu bentuk aktivitas masyarakat setempat dalam mengelola hasil hutan selain dari kegiatan berladang.

Akhir-akhir ini populasi rotan sudah semakin langka, karena kegiatan merotan telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak tahun 70-an, dan tidak disertai dengan upaya pembudidayaan rotan dari masyarakat. Pengolahan rotan hanya dilakukan secara terus menerus tanpa dipikirkan oleh masyarakat bagaimana upaya untuk tetap mempertahankan kelangsungan populasi rotan tersebut.

Oleh karena itu, seiring dengan semakin berkurangnya populasi rotan, maka masyarakat lambat laun kemudian beralih ke kegiatan mengambil hasil-hasil hutan yang lain, seperti mengambil kayu, ubi hutan, jamur hutan dan pucuk rotan dan umbi-umbian.

Kegiatan mengambil kayu merupakan salah aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Pada awalnya kegiatan mengambil kayu oleh masyarakat setempat hanya dilakukan sekedar mengambil kayu bakar untuk kebutuhan memasak atau untuk kebutuhan ramuan rumah tinggal mereka. Pengambilan kayu untuk kebutuhan memasak hanya dilakukan dengan pemilihan pada kayu yang telah mati atau pada cabang-cabang kayu yang telah mengalami pelapukan. Sedangkan pengambilan kayu untuk kebutuhan ramuan rumah dilakukan pada kayu-kayu yang masih hidup dan mempunyai kualitas yang dapat bertahan sampai puluhan tahun lamanya. Pengolahan kayu untuk ramuan rumah tersebut dilakukan masih dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada sebagian masyarakat, selain mengambil kayu untuk keperluan ramuan rumah, juga untuk bahan membuat perahu baik perahu batang yang khususnya dilakukan oleh orang Tolaki, maupun perahu tempel oleh orang bugis. Kegiatan mengambil kayu di hutan untuk keperluan membuat perahu sangat rendah intensitasnya. Diperkirakan dalam setahun seorang hanya mampu membuat 2 atau 3 buah perahu batang sedangkan perahu tempel biasanya waktu setahun tidak cukup.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan mengambil kayu oleh masyarakat setempat telah berubah menjadi kegiatan mengolah kayu, ikut mendorong cepatnya proses deforestasi kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya komersialisasi di pedesaan dan kota, meningkatnya kebutuhan masyarakat secara ekonomis dan munculnya usaha yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kayu (Sawmill). Kegiatan semacam ini terjadi di Kecamatan Lainea, Kecamatan Kolono, Kecamatan Palangga, Kecamatan Moramo, Kecamatan Laonti, Kecamatan Konda dan Kecamatan Angata.

Dalam upaya mendukung berkembangnya usaha pengolahan kayu oleh masyarakat setempat maka pemerintah daerah mengeluarkan IPKTM atau Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada penambangan kayu. Model pengelolaan ini dibuat oleh pemerintah sebagai sarana melegalisasi pengelolaan hutan yang terdapat di atas tanah milik masyarakat. Upaya melegalisasi tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1996 ketika Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam.

Di Kabupaten Konawe Selatan ditemukan sebanyak 5 IPKTM yang dimiliki oleh masyarakat. Masing-masing IPKTM tersebut rata-rata seluas 5 hingga 10 Ha dan atau dengan tegakan antara 300 hingga 1.800 tegakan. Umumnya kayu-kayu IPKTM tersebut adalah jati dan tidak ditemukan jenis IPKTM rimba.

Pada kenyataannya pengelolaan IPKTM tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa fakta di lapangan ditemukan di antaranya adalah: 1) pemilik Izin bukan masyarakat asli yang

sesungguhnya tetapi biasanya seorang pengusaha lokal yang mengatasnamakan masyarakat melalui iming-iming uang. Izin tersebut keluar atas nama pengusaha bersangkutan; 2) IPKTM yang sesungguhnya menjadi milik masyarakat dijual kepada pihak lain dan biasanya juga kepada pengusaha lokal dengan sistem jual beli izin; 3) IPKTM hanya digunakan sebagai bukti legal pengolaan kayu jati tetapi sesungguhnya yang diolah adalah kayu jati diluar IPKTM dan biasanya kayu jati dari areal Reboisasi dan IPKTM; 4) lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas Kehutanan, karena praktek-praktek ilegal tersebut berkenaan dengan IPKTM pada dasarnya diketahui oleh aparat kehutanan setempat.



Sumber : PPLH UNHALU, 2005

Gambar 8. Salah satu industri sawmil di Konawe Selatan

Berkaitan dengan IPKTM adalah pembangunan sawmill di berbagai tempat di Konawe Selatan. Kayu-kayu yang diolah di sawmil adalah kayu jati baik yang berasal dari areal hutan jati Reboisasi dan HTI maupun dari areal hutan jati rakyat, baik kayu legal maupun ilegal. Keberadaan industri sawmil di berbadai tempat di Konawe Selatan tersebut, telah turut mendorong laju ilegal logging pada areal hutan jati Reboisasi dan HTI. Selain mendorong kegiatan ilegal logging, industri sawmil juga menyebabkan kebisingan, debu dan yang paling penting

adalah pembuangan limbah gergajian yang dilakukan di alur-alur sungai sehingga sungai menjadi tertutup. Industri sawmil tersebar di beberapa kecamatan dengan dua kecamatan paling tinggi yaitu Kecamatan Lainea dan Kecamatan Kolono.

Maraknya aktifitas pemanfaatan sumber daya hutan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kesenjangan sosial dan kemiskinan yang menonjol pada masyarakat sekitar kawasan hutan dan pembangunan kurang dirasakan manfaatnya pada wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya hutan, karena kebijakan selama ini berjalan terlalu sentralistik dan tidak peduli dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti ini. Kenyataan ini didukung pula oleh populasi penduduk yang terus menerus mengalami pertumbuhan baik oleh faktor alamiah maupun non alamiah.
2. Masih dominannya perspektif yang salah tentang hutan, yakni pandangan yang menganggap bahwa hutan adalah kayu (*timber extraction*), sementara itu fungsi ekologis dan kultural dari hutan diabaikan. Akibatnya hutan alam diganti dengan hutan jati yang akhirnya mengganggu sistem mata pencaharian hidup penduduk sekitar kawasan hutan. Selain itu yang paling fatal juga adalah menyebabkan terjadinya kekeringan air sungai yang meliputi 11 sungai di Kecamatan Lainea.
3. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap para pelaku perambahan kawasan dan pelaku illegal logging. Selain itu pula terkesan bahwa proses penegakan hukum berkaitan dengan praktek ilegal logging hanya ditujukan dan diterapkan pada masyarakat, sementara itu banyak aparat dan pejabat yang terlibat dibiarkan saja lepas dari jerat hukum.
4. Sikap masyarakat terhadap hutan yang beranggapan bahwa sumber daya hutan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja tanpa adanya aturan serta ketidakpedulian masyarakat terhadap

kerusakan hutan, sehingga program-program pelestarian hutan belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

3.1.4. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Perikanan)

Tekanan utama terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Laut adalah (1) Semakin menipisnya populasi hutan mangrove yang disebabkan oleh: eksploitasi hutan mangrove untuk kepentingan ekspor ke Taiwan pada dekade 1980-an, pembangunan tambak rakyat, ekspansi pemukiman penduduk dan keperluan bahan bangunan dan kayu bakar (2) Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh aktivitas penambangan (untuk kepentingan pembangunan rumah, jembatan dan pembuatan kapur), penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (menggunakan bahan peledak dan bahan kimia beracun/cianida).

Penebangan hutan mangrove secara massal untuk kepentingan ekspor ke Taiwan terjadi pada dekade 1980-an. Pada saat itu pusat operasi pengelolaan hutan mangrove di Konawe Selatan terletak di Muara Sungai Laea dan di Muara Sungai Rara Kecamatan Lainea. Lokasi hutan mangrove yang mengalami deforestasi akibat eksploitasi hutan mangrove tersebut adalah di Kecamatan Lainea.

Kegiatan lain yang menyebabkan menipisnya populasi hutan mangrove adalah pembangunan tambak rakyat. Lokasi-lokasi hutan mangrove yang telah mengalami deforestasi secara signifikan akibat kegiatan ini adalah di Kecamatan Lainea, Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Kolono. Perluasan tambak dapat menyebabkan terjadinya degradasi hutan mangrove dan hilangnya beberapa spesies dari flora dan fauna mangrove serta hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai penyangga abrasi pantai (peredam ombak) dan penyaring bahan-bahan pencemar (sedimentasi). Upaya intensifikasi tambak yang berlangsung, akan menyebabkan tercemarnya perairan laut karena lokasi tambak yang

ada berbatasan langsung dengan perairan Teluk (berada pada kawasan estuaria).

Sementara itu pengambilan bakau untuk bahan bangunan rumah dan kayu bakar walau dampaknya tidak setara dengan dua kegiatan sebelumnya, tetapi memberi dampak yang cukup signifikan terhadap semakin menipisnya hutan mangrove terjadi di Kecamatan Lainea, Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Kolono.



Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 9. Kayu bakar dan pemukiman penduduk, bentuk eksploitasi hutan mangrove

Sedangkan pengambilan terumbu karang terjadi di Kecamatan Lainea dan Kecamatan Tinanggea. Selain itu juga, walau intensitasnya masih rendah, kegiatan manusia yang turut memberikan tekanan yang signifikan terhadap kelestarian sumber daya pesisir dan laut adalah penggunaan bahan peledak (bom), pukot harimau, bius dan sebagainya dalam menangkap ikan. Perilaku ini merusak ekosistem terumbu karang dan habitat ikan yang dapat mengancam kelestarian berbagai macam jenis ikan dilaut.

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa aktifitas perikanan ditunjang oleh berbagai fasilitas di antaranya adalah perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Penggunaan teknologi tradisional seperti jukung dalam kegiatan perikanan di Konawe Selatan masih cukup dominan. Hal

ini sebagaimana ditunjukkan oleh data tahun tersebut yakni sebanyak 1.274 buah, jumlah ini cukup banyak jika dibandingkan dengan fasilitas lainnya. Sementara itu penggunaan motor tempel hanya mencapai 793 buah dan kapal motor sebanyak 125 buah.



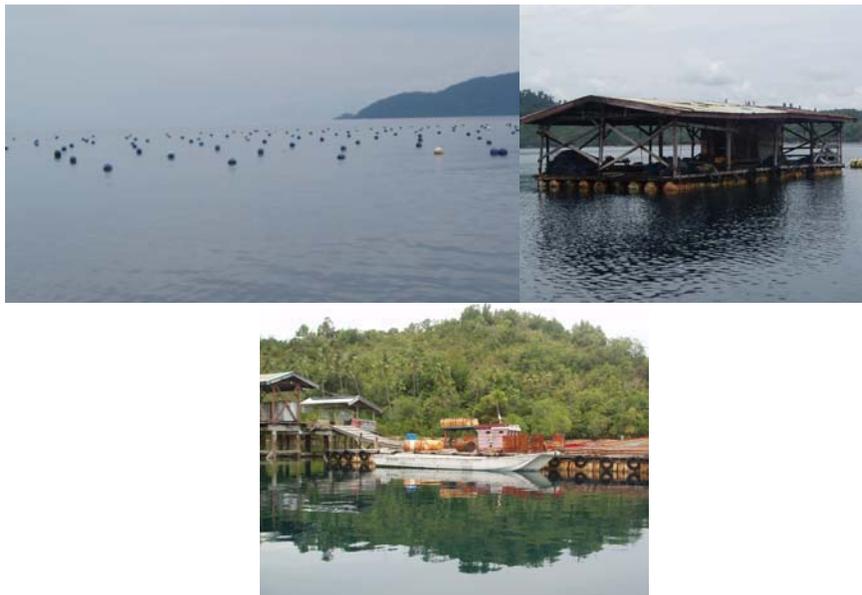
Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 10. Perkampungan nelayan dengan ikan jemur di depannya

Sama halnya dengan fasilitas transportasi melaut yang masih dominan tradisional, begitu pula alat tangkap yang digunakan oleh nelayan. Data tahun 2004 menunjukkan bahwa alat tangkap paling banyak digunakan oleh nelayan adalah pancing yaitu 1.499 buah untuk kegiatan menangkap ikan di laut dan pada perairan umum 7.249 buah. Alat-alat tangkap lainnya adalah pukat pantai sebanyak 280 buah, pukat cinin 18 buah, jaring insang hanyut 319 buah, jaring insang lingkaran 165 buah, jaring insang tetap 710 buah dan lain-lain alat tangkap. Secara keseluruhan kegiatan perikanan di Konawe Selatan menggunakan 5.277 buah alat tangkap di laut dan 12.661 buah alat tangkap untuk perairan umum.

Pada tahun 2004 tercatat produksi ikan dari berbagai jenis perairan di Konawe Selatan sebagai berikut yaitu perairan tambak dengan total produksi 369,1 ton dan nilai produksi Rp. 6.410.000.000,-, jenis perairan kolam sebesar 281 ton dengan nilai produksi Rp. 2.398.000.000,- dan perikanan laut sebesar 10.933 ton dengan nilai produksi Rp. 30.848.000.000,-. Secara umum total produksi perikanan Konawe Selatan tahun 2004 sebesar 10.933 ton dengan nilai Rp. 39.656.000.000,-, angka ini menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan di Konawe Selatan, karena itu dianggap merupakan salah satu sektor yang prospek untuk dikembangkan.

Sedangkan total produksi ikan olahan di Konawe Selatan tahun 2004 sebesar 2.620,9 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 32.556.100.000,- yang terdistribusi ke dalam beberapa jenis ikan olahan, di antaranya yang paling besar adalah pengeringan/pembekuan sebesar 1.530,2 ton dengan nilai produksi Rp. 19.892.600.000,- dan paling kecil jenis olahan terasi sebesar 5,0 ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 8.000.000,-.



Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 11. Budidaya Kerang Mutiara di desa Wawosunggu Kecamatan Moramo. Contoh aktivitas dari kegiatan budidaya yang membuang limbah ke laut (Gambar bawah).

Selain perikanan tangkap, di Konawe Selatan juga telah berkembang kegiatan perikanan budidaya, seperti budidaya kerang mutiara dan rumput laut di desa Wawosunggu Kecamatan Moramo, serta di teluk Kolono Kecamatan Kolono.

Berkaitan dengan lingkungan pesisir dan laut, beberapa tantangan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan di Konawe Selatan adalah :

- a. Kerusakan fisik ekosistem. Kerusakan fisik ini umumnya pada ekosistem terumbu karang dan mangrove yang disebabkan oleh pengambilan secara ilegal. Selain itu, kerusakan ekosistem pantai juga banyak disebabkan oleh kegiatan darat (*upland*), berupa sedimentasi yang mengendap dipesisir.
- b. Konflik penggunaan ruang. Hal ini terjadi akibat belum adanya aturan yang jelas dan/atau aturan yang masih tumpang tindih berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan. Beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam penggunaan ruang wilayah pesisir dan lautan di antaranya adalah kegiatan pertanian di daerah hulu, perikanan tangkap, perhubungan, budidaya mutiara.
- c. Kemiskinan masyarakat pesisir. Faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir dapat dilihat dari aspek struktural, kultural, dan aspek alamiah. Secara struktural masyarakat wilayah pesisir kebanyakan memiliki posisi sosial ekonomi yang lemah, karena kebijakan pembangunan kebanyakan yang tidak memihak kepada mereka. Secara kultural masyarakat pesisir juga memiliki nilai-nilai lokal yang kurang kondusif untuk suatu kemajuan, seperti pola hidup konsumtif, pandangan kolot, dan kemampuan mengorganisasi diri yang rendah.

3.1.5. Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan berupa batu intan dan nikel, granit, marmer, pasir dan kerikil, tanah liat dan tanah urug serta batu gunung untuk kebutuhan bahan bangunan. Berdasarkan hasil survey tahun 2005 terdapat bahan galian lain yang belum dikelola hingga kini yaitu batu intan dan nikel di Kecamatan Lainea. Khusus untuk nikel sebenarnya telah dilakukan kontrak karya pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. INCO, Tbk semenjak tahun 1967 tetapi hingga kini pihak perusahaan tersebut belum melakukan eksploitasi. Sedangkan batu granit dan marmer serta tambang galan C seperti pasir dan kerikil dan tanah liat serta batu gunung untuk kebutuhan bahan bangunan telah berlangsung lama dan merupakan salah satu sumber matapencaharian penduduk di beberapa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan.

Lokasi kegiatan tambang galian C ini adalah pada bantaran sungai, wilayah pesisir, gunung-gunung batu dan berkapur serta areal tanah liat. Penambangan pasir terutama berlangsung dibantaran sungai di beberapa sungai besar seperti sungai Lapoa, Roraya, Windo, Lainea dan sungai-sungai lainnya. Penambangan Marmer dan batu gunung terbesar berlangsung di Kecamatan Moramo, sedangkan pembuatan bata merah (batu bata) berlangsung di Kecamatan Ranomeeto.

Penambangan pasir laut dan batu karang masih dijumpai di beberapa Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan meskipun tidak teridentifikasi dengan jelas, terutama digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan rumah tangga.

Kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, tanah longsor hilangnya vegetasi sebagai habitat beberapa jenis satwa dan perubahan pola aliran air permukaan, polusi udara, pencemaran air dan perubahan iklim mikro.



Sumber : Made W.A., 2005

Gambar 12. Bahan galian/penambangan batu gunung di Kecamatan Moramo

3.1.6. Industri

Berdasarkan perkembangannya saat ini dan kecenderungan di masa mendatang dapat dikemukakan bahwa kegiatan sektor industri yang paling menonjol mendorong roda perekonomian dan dapat menciptakan lapangan kerja adalah industri marmer, pengolahan hasil hutan dan industri rumah tangga skala kecil (industri pengolahan makanan:tahu dan tempe) dan minuman (air minum kemas). Keadaan ini akan memacu industri tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga disisi lain akan menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Konawe Selatan.

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang dapat menimbulkan pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan lingkungan. Karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan pihak-pihak lainnya agar pengembangan industri di daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah serta menekan seminimal mungkin dampak negatif yang dapat ditimbulkannya.

Berdasarkan data tahun 2004, usaha industri yang terdapat di Konawe Selatan meliputi kelompok industri logam, mesin dan elektro serta kelompok industri kimia, agro dan hasil kehutanan. Kelompok industri yang disebutkan pertama terdiri dari 9 unit usaha dengan tenaga kerja 27 orang dan nilai produksi mencapai Rp. 302.000.000,-. Sedangkan kelompok industri kedua terdiri 20 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja 116 orang dan nilai produksi Rp. 6.139.000.000,-.

Sementara itu usaha industri kecil non formal hanya terdiri dari jenis industri kelompok pertama dengan unit usaha sebanyak 201 unit, jumlah tenaga kerja 1.105 orang dan nilai produksi mencapai Rp. 2.714.000.000,-.

Apabila diperhatikan dari segi daya serap tenaga kerja, industri kecil non formal jauh lebih unggul dibandingkan dengan industri besar/średang. Hal ini berarti pengembangan usaha industri kecil non formal lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan pengembangan usaha besar/średang. Tetapi apabila dilihat dari segi nilai produksi, maka industri besar/średang jauh lebih unggul dibanding dengan usaha kecil non formal. Artinya untuk peningkatan PAD, pengembangan usaha ini lebih prospek.

Aktivitas industri akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan seperti kebisingan, kebauan, pencemaran udara (gas dan debu) dan air (penurunan kualitas perairan).

3.2 Kondisi Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam masih merupakan tumpuan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Selatan. Disisi lain pemanfaatan sumber daya alam dan energi dilakukan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengurasan sumber daya alam secara tak terkendali. Pengalaman menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang dilaksanakan selama ini lebih mengutamakan kepada upaya

mengejar perolehan keuntungan, sehingga dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga secara gradual degradasi kondisi lingkungan hidup terjadi perubahan secara signifikan seperti degradasi tanah karena tingkat erosi yang tinggi dan banyaknya sungai-sungai yang mengalami kekeringan karena rusaknya kawasan penyangga (DAS).

3.2.1. Degradasi Sumber Daya Tanah dan Hutan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam penting yang tidak terpisahkan dengan kegiatan manusia. Tanpa tanah, tak akan ada pembangunan dan kehidupan dimuka bumi ini, karena sangat tergantung padanya. Oleh karena itu antara keduanya, manusia dan tanah saling mempengaruhi. Kesalahan dalam mengelola sumber daya tanah untuk kepentingan pembangunan dan kelangsungan hidup manusia akan menyebabkan degradasi tanah.

Salah satu penyebab utama terjadinya degradasi tanah di Kabupaten Konawe Selatan adalah adanya kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani pada lahan yang mempunyai topografi berbukit/miring pada berbagai tempat dikabupaten Konawe Selatan yang tidak diuikti oleh upaya konservasi. Kebanyakan petani lahan kering menerapkan sistem pertanian monokultur pada lahan-lahan berbukit/miring. Teknik budidaya seperti ini tidak mampu mempertahankan kesuburan tanah dan tanah menjadi cepat kritis.

Kondisi irigasi di Kabupaten Konawe Selatan saat ini mengalami kerusakan tanggul-tanggul menyebabkan terjadinya erosi dan banjir pada musim hujan yang juga berkontribusi pada peningkatan degradasi tanah berupa penurunan kesuburan tanah baik secara fisik maupun kimia.

Disamping itu, degradasi tanah terjadi sebagai akibat eksploitasi sumber daya hutan dan aktivitas penebangan hutan secara liar terutama pada kawasan hutan Air terjun Moramo dan berbagai kawasan hutan

mendoke (sekitar taman Nasional Rawa Aopa Watumohai) serta berbagai kawasan hutan lainnya di wilayah Konawe Selatan, mengakibatkan hilangnya fungsi vegetasi sebagai pelindung dan penutup tanah oleh pukulan butir hujan. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya erosititas dan menurunnya erodibilitas tanah. Kegiatan ini tidak hanya menurunkan kesuburan tanah pada tempat dimana kegiatan ini berlangsung tapi juga menyebabkan penurunan kesuburan tanah-tanah yang berdekatan dengan kawasan tersebut. Pada tahun 2004 luas hutan Konawe Selatan adalah 293.811 ha, lebih kecil dibandingkan dengan luas hutan pada satu tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 seluas 421.293 ha atau mengalami penurunan seluas 127.482 ha. Angka penurunan ini cukup signifikan mencapai 30,26 % dari total luas hutan sebelumnya.. Apabila diperhatikan data-data hutan yang ada, sebenarnya tidak terjadi tekanan yang signifikan terhadap SDH sesuai dengan sistem TGHK. Tetapi hal tersebut terjadi pada keberadaan kawasan budidaya non kehutanan yang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 mencapai 208.909 ha—suatu jumlah yang cukup besar—dan pada tahun 2004 tercatat 0 ha.

Kategori penggunaan lahan di Konawe Selatan meliputi tanah sawah, tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, tegalan/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa yang tidak ditanami, tambang/kolam/tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan tanaman kayu-kayuan hutan rakyat, hutan negara, perkebunan, dan lain-lain. Di antara kategori penggunaan lahan tersebut, yang paling besar adalah kategori hutan negara yakni 154.915 ha pada tahun 2004 sedang pada tahun 2003 mencapai 173.754. Hal ini berarti terjadi penurunan luas hutan negara sekitar 18.839 ha atau 10,84 %.

Selanjutnya adalah penggunaan lahan untuk kepentingan perkebunan mencapai 77.162 ha pada tahun 2004 sedang pada tahun 2003 seluas 37.154 ha. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan di bidang usaha perkebunan sebesar 40.008 ha dalam setahun terakhir. Penggunaan lahan yang paling kecil adalah untuk kepentingan tambak,

kolam, tebat dan empang yang keseluruhannya hanya mencapai 2.352ha pada tahun 2004 dan pada tahun 2003 hanya seluas 1.226 ha. Hal ini mengalami peningkatan seluas 1.126 atau 47,87%.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, nampaknya ekspansi penggunaan lahan di Konawe Selatan terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi kelsetarian lingkungan di masa datang. Tingginya ekspansi penggunaan lahan tersebut salah satunya disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah penduduk, karena itu diperlukan suatu kebijakan yang tepat agar kepentingan penggunaan lahan tetap sepadan dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga tidak mengancam kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2005, usaha pertanian sebagaimana diuraikan di atas lebih banyak yang diusahakan oleh masyarakat dibandingkan dengan yang diusahakan oleh swasta dan pemerintah. Areal pertanian dan perkebunan rakyat tersebut bersifat intensif atau heterokultur dan tersebar ke dalam beberapa areal lahan. Lahan yang paling banyak diusahakan sebagai areal pertanian dan perkebunan adalah pada lahan hutan rakyat yang bersinggungan dengan areal hutan negara.

Berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, kondisi lahan turut pula dipengaruhi oleh penggunaan pupuk dan pestisida. Jenis pupuk yang digunakan petani dalam budidaya tanaman pertanian pada umumnya masih tergantung pada pupuk anorganik seperti Urea, TSP atau SP-36, dan KCL. Penggunaan pupuk anorganik lebih diminati karena pengaruh positif pupuk sebagai penyubur tanah dan memperbaiki pertumbuhannya dan perkembangan tanaman dapat terlihat secara nyata karena kandungan unsur haranya relatif cepat tersedia dan siap terabsorpsi oleh tanaman. Namun demikian, dosis pupuk anorganik yang diaplikasikan masih jauh dibawah anjuran. Hal ini dikarenakan harga pupuk yang tinggi, serta pengetahuan petani yang relatif terbatas. Sebagai contoh, untuk bercocok tanam padi sawah petani di SP3 Tinanggea hanya melakukan pemupukan Urea dengan dosis 50 kg/ha (tanpa SP-36/TSP dan KCL),

sedangkan petani di Desa Jati Bali dan Landono melakukan pemupukan Urea dan SP-36 berturut-turut dengan dosis 100 kg/ha dan 50 kg/ha (tanpa KCL).



Sumber : LD Afa, 2005

Gambar 13. Areal persawahan yang menggunakan pupuk & pestisida

Penggunaan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang (sapi, ayam, guano) masih sangat terbatas dan hanya dilakukan oleh petani tanaman sayur-sayuran. Aplikasi pupuk organik inipun dibarengi oleh aplikasi pupuk anorganik. Dampak positif dari pupuk organik terlihat lebih lambat karena pupuk organik membutuhkan jangka waktu tertentu untuk terdekomposisi (termineralisasi) menjadi unsur-unsur hara yang siap diabsorpsi oleh tanaman. Waktu yang dibutuhkan dalam dekomposisi pupuk organik ini sangat tergantung dari ukuran pupuk organik yang diaplikasikan. Semakin besar atau kasar tekstur pupuk organik yang diaplikasikan, akan semakin lama terdekomposisi dan semakin lama unsur hara yang tersedia bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Aplikasi pestisida pada hakekatnya dilakukan untuk mengendalikan hama/penyakit yang menyerang tanaman. Pengendalian hama/penyakit yang umum dilakukan oleh petani adalah secara kimiawi, sedangkan pengendalian secara mekanik masih relatif terbatas misalnya dengan

memotong cabang/ranting jeruk, kakao yang terserang penyakit. Pengendalian hama/penyakit dengan menggunakan musuh alami belum dilaporkan.

Penggunaan bahan kimia dalam pengendalian hama/penyakit berdampak pada ikut matinya predator atau musuh alami hama/penyakit tanaman yang ada. Selain itu, bahan aktif dari pestisida yang umumnya sangat sulit terhidrolisis akan terakumulasi dan ikut terhanyut bersama *run-off* atau bersama air perkolasi yang pada gilirannya dapat berakibat pada keseimbangan lingkungan.

Dosis/kekerapan aplikasi pestisida tergantung dari tingkat serangan hama/penyakit. Semakin tinggi tingkat serangan semakin sering aplikasi pestisida dilakukan yang biasanya diiringi dengan dosis yang lebih tinggi pula.

3.2.2. Pencemaran Udara

Sumber-sumber pencemaran udara di Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki keakuratan dan sumber data yang jelas adalah : Pencemaran udara bersumber dari Industri pengolahan: pengolahan Makanan dan minuman, pengolahan kapur; pembangkit tenaga/PLTD, tungku domestik, Kendaraan bermotor dan kapal motor dipelabuhan serta pesawat udara.

Pencemaran udara yang terjadi karena emisi gas buangan kendaraan, partikel-partikel debu yang berasal dari pembakaran dan debu-debu jalanan yang dibawa oleh angin. Untuk kasus di Kabupaten Konawe Selatan, Emisi gas buangan kendaraan bermotor masih bisa distimulir oleh tiupan angin sepanjang hari. Tetapi melihat perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Konawe Selatan semakin meningkat seiring dengan perkembangan dan letak wilayah, maka pengaruh gas emisi buangan dari kendaraan harus diwaspadai.

Kendaraan bermotor yang beroperasi di Konawe Selatan terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, baik umum maupun tidak umum. Data terakhir tahun 2002 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan

roda dua sebanyak 13.218 unit dan kendaraan roda empat sebanyak 4.253. Data ini sudah jauh mengalami perubahan, diperkirakan jumlah kendaraan yang beroperasi di Konawe Selatan baik roda dua maupun roda empat sudah mengalami penambahan hingga dua kali lipat.



Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 14. Pertigaan Punggaluku dan Terminal Pelabuhan *Ferry* Torobulu Kecamatan Lainea. Dua contoh kawasan padat kendaraan, sumber pencemaran udara di Konawe Selatan.

Selain transportasi darat di Konawe Selatan terdapat pula transportasi udara. Data tahun 2004 menunjukkan padatnya kegiatan penerbangan yang terjadi di Bandar Udara Wolter Monginsidi (WMI) tahun ini sebanyak 1.482 penerbangan dengan jumlah penumpang berangkat 136.518 orang dan tiba 139.605 orang. Angka ini jauh mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 yang mencatat 1.114 penerbangan dengan jumlah penumpang berangkat 82.947 orang dan tiba 82.082 orang. Adapun maskapai yang tercatat beroperasi di bandara WMI yaitu Sempati Air, MNA, LNA, Citylink dan Pelita Air. Dari sekian maskapai tersebut yang masih aktif melayani rute bandara WMI adalah MNA dan LNA dengan masing-masing 2 dan 3 kali penerbangan setiap hari.

Sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan; mesin penggilingan padi dan bahan galian C. Kegiatan-kegiatan ini menambah beban pencemaran udara dalam hal ini menambah kadar debu, NO_x , Hidrocarbon (HC), Karbon monoksida (CO) dan Sulfur Oksida (SO_x). Beban

pencemaran udara dari berbagai sumber pencemar telah diestimasi dari data-data tahun 2004, disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sumber dan Beban Pencemaran Udara Kabupaten Konawe Selatan.

Beban Pencemaran Udara	Debu	SO ₂	NO	HC	CO	CO ₂
Sumber	ton/thn	ton/thn	ton/thn	ton/thn	ton/thn	ton/thn
1	2	3	4	5	6	7
Industri Pengolahan						
1. Industri Makanan (Pengolahan Biji-bijian)	3.02					
2. Industri Mineral Non Logam (Bahan Bangunan Dari Tanah Liat)	349.05					
Sumber Tetap (Konsumsi Bahan Bakar)						
1. Pembangkit Tenaga (minyak bumi)	0.1898	36.318	2.409	0.0237	0.1205	538.3750
2. Tungku Domestik						
- Kayu bakar	51.49238	96.048	960.48	192.096	192.096	290,064.96
- Minyak tanah	30.89543	163.2816	110.4552	19.2096	12.006	151275.6
Dari Sumber Bergerak (konsumsi bahan bakar)						
1. Mobil dan Truk						
- Bensin		2.78	265.1857	373.3197	9706.3127	81100.4906
- Solar		97.84	141.604	33.47	559.9796	40550.2453
2. Kapal Motor Dipelabuhan	2.7375	7.1175	8.2855	5.4385	7.592	264.99

Sumber: Diolah dari Data Tahun 2004

Sementara itu, kondisi kualitas udara Berdasarkan hasil pengukuran disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kualitas Udara Pada Beberapa Titik Pengamatan di Konawe Selatan

No.	Parameter	Satuan	Stasiun				Baku Mutu	Metode
			A	B	C	D		
1	Sulfur dioksida	nm ³	1,25	1,02	2,12	ttd	900µg/nm ³	Pararosanilin
2	Nitrogen dioksida	nm ³	ttd	ttd	1,58	ttd	400µg/nm ³	Saltman
8	Debu	nm ³	ttd	ttd	ttd	ttd	90µg/nm ³	HVAS
9	Timbal (Pb)	nm ³	ttd	ttd	ttd	ttd	2µg/nm ³	AAS

Keterangan:
 A= Pelabuhan Torobulu
 B= Kantor Pemkab Konsel
 C= Pertigaan Punggaluku-Andoolo-Torobulu
 D= Hutan Wolasi

3.2.3. Pencemaran Air

Sumber pencemaran air di Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki keakuratan dan sumber data yang jelas bersumber dari efluen industri pengolahan : indsutri kayu dan olahan kayu serta limbah domestik. Sumber-sumber pencemaran tersebut merupakan sumber NO_x, Hidrocarbon (HC), Karbon monoksida (CO) dan Sulfur Oksida (SO_x).

Sumber pencemar lainnya berasal dari kegiatan; pertanian/perkebunan, peternakan, perikanan (tambak), rumah sakit, bahan galian C dan pasar. Kegiatan-kegiatan ini menambah beban pencemaran air. Beban pencemaran air dari berbagai sumber pencemar telah diestimasi dari data-data tahun 2004, disajikan pada Tabel 3.3. Sedangkan hasil pengukuran kondisi kualitas air disajikan pada Tabel 3.4.

Pencemaran pada badan air terjadi pada beberapa sungai besar yang berkaitan dengan kegiatan pertanian sebagai sumber irigasi dan rusaknya hutan pada bagian hulu DAS, menyebabkan tingginya erosi dan aliran permukaan yang membawa sedimentasi, akibatnya terjadi

pendangkalan dan kekeruhan air sungai serta menurunnya produktivitas perairan dan terganggunya biota yang ada di perairan.

Tabel 3.3. Sumber dan Beban Pencemaran Air

Jumlah beban limbah dan pencemaran air							
Sumber	Volume limbah	BOD5	COD	SS	TDS	N	P
	(m ³ per tahun)	(ton per tahun)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Agro-industri	172.00	7,471.00	0	25,152.00	0	1,015.00	0
Industri pengolahan	0.42	60.93	0	0.96	0	0	0
Sumber domestik	3,841,917	600,733.70	1,361,800	916,312.00	1,920,959	173,675.70	21,051.60
Sumber-sumber lain							
Jumlah	3,842,089.42	608,265.63	1,361,800	941,464.96	1,920,959	174,690.70	21,051.60

Sumber: BPS Kabupaten Konawe Selatan 2004, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Konawe Selatan 2004, Dinas Perindag Kabupaten Konawe Selatan 2004, Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan 2004, Setelah Diolah

Persampahan/limbah juga dapat menimbulkan pencemaran air bila sampah dibuang sembarangan. Bila musim hujan tiba maka sampah-sampah tersebut terbawah aliran air permukaan atau bersama banjir masuk kesungai. Sampah rumah tangga di kabupaten Konawe Selatan dimusnahkan sendiri oleh masyarakat, baik dengan cara membakar, dibuang kekebun, bahkan dibuang ke sungai/kali dan kesaluran-saluran drainase.

Masalah limbah belum menjadi masalah utama di Konawe Selatan. Hasil survey tahun 2005 menunjukkan sumber utama limbah berasal dari sampah rumah tangga berupa limbah padat. Sementara itu limbah cair yang berasal dari industri belum begitu nampak, hal ini disebabkan karena belum adanya industri skala besar yang beroperasi di Konawe Selatan seperti halnya di kota-kota lain.



Sumber : Sarlan A., 2005

Gambar 15. Bentuk dan pemanfaatan TPS di Desa Potoro, Kab. Konawe Selatan

Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksudkan di atas umumnya hanya dibuang di belakang rumah sementara itu TPS yang disediakan oleh pemda tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena selain masih luasnya halaman pemukiman masyarakat tempat menampung sampah sebelum dibakar, juga TPS tersebut letaknya jauh dari pemukiman. Bahkan beberapa tempat pembuangan sampah tersebut terletak di tengah hutan tanpa ada pemukiman disitu. Sebagai contoh di Desa Potoro ditemukan TPS terletak ditengah rerumputan yang dihimpit oleh pohon sagu, sepintas TPS ini tidak nampak kelihatan.

Tabel 3.4. Kualitas Air Sungai pada Beberapa Titik Pengamatan

No.	Parameter	Satuan	Lokasi		
			Sungai Roraya	Sungai Lamonga	Sungai Laeya
A	Fisik				
1	Suhu	°C	21	22	22
2	TSS	mg/l	0,026	0,026	0,026
3	TDS		0,12	0,12	0,12
4	DHL	Umhos/cm	77	72	74
B	Kimia				
1.	pH	-	7,3	7,2	7,3
2.	DO	mg/l	7,8	7,6	7,6
3.	BOD	mg/l	6,4	4,5	4,6
4.	COD	mg/l	379,2	379,2	252,8
5.	Kesadahan Total	mg/l	162	160	160
6.	Fe (besi)	mg/l	2,232	3,92	2,0981
7.	Nitrit (NO ₂)	mg/l	0,04	0,02	0,11
8.	Nitrat (NO ₃)	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1
9.	Amonia (NH ₃)	mg/l	1,088	1,224	1,088
10.	Merkuri (Hg)	mg/l	0,003	0,004	0,012
11.	Zink (Zn)	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02
12.	Mangan (Mn)	mg/l	ttd	ttd	Ttd
13.	Residu Minyak	mg/l	50,11	49,44	50,02

Sumber : Hasil pengukuran lapangan dan analisis lab. Nopember 2005.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa sampel sungai ditemukan beberapa masalah sumber daya air di Konawe Selatan, diantaranya adalah fenomena kekeringan pada beberapa ruas sungai. Hal ini terjadi pada hampir seluruh sungai di Konawe Selatan. Beberapa ruas sungai sudah tidak lagi dialiri air dan bahkan pada beberapa sungai lagi praktis tidak lagi dialiri air, kecuali itu dengan debit yang sangat kecil pada musim hujan.



Sumber : Made, W.A., 2005

Gambar 16. Sungai Laea yang memperlihatkan kondisi air

Kondisi yang diuraikan tersebut nampak dalam gambar di atas dimana sebagian besar bagian sungai sudah mengering. Kenyataan tersebut menandakan terjadinya penurunan jumlah air tawar yang cukup signifikan yang bersumber dari air sungai. Hal ini kontras dengan semakin tingginya kebutuhan penduduk terhadap air tawar. Sebagai contoh, Konawe Selatan belum memiliki PDAM yang memadai sebagai sumber air bersih dan diharapkan Sungai Roraesa dapat menjadi sumber mata air bagi PDAM tersebut. Hanya saja sebagaimana data yang ditunjukkan di atas, debit air Sungai Roraesa sudah semakin menurun.

Selain sungai sebagai sumber air bersih, penduduk Konawe Selatan juga memanfaatkan sumur buatan. Berdasarkan survey 2005, beberapa penduduk memiliki sumur sendiri-sendiri, sementara penduduk lainnya memanfaatkan sungai dan sumur orang lain. Terhadap kenyataan semakin tingginya kebutuhan penduduk pada air bersih di satu sisi, dengan kenyataan semakin menurunnya persediaan air tawar di sungai membutuhkan sikap yang arif dari semua pihak untuk melakukan langkah-langkah yang lebih nyata agar persediaan air tawar tetap terjamin keberlangsungannya.



Sumber : LD Afa, 2005

Gambar 17. Perusahaan Air Minum dan Sumur Umum

3.2.4. Degradasi Sumber Daya Pesisir dan Laut

Panjang garis pantai Kabupaten Konawe Selatan 287.03 km dan luas kawasan mangrove adalah 1.000.525. ha. Berbagai jenis tumbuhan terdapat dalam kawasan ini meliputi bako, kondawu, tuwasi, poropa, nipah serta beragam tumbuhan pantai lainnya. Berdasarkan hasil survey, hutan mangrove di Konawe Selatan sudah mengalami deforestasi. Pada beberapa bagian kawasan pesisir, populasi mangrove semakin berkurang dan bahkan punah. Kondisi seperti ini merata ditemukan diseluruh wilayah pesisir.

Hasil survey tahun 2005 diperkirakan tingkat kerusakan hutan mangrove mencapai 46,21% -60,00%. Keadaan ini sudah cukup parah karena itu diperlukan penanganan khusus dari Pemda Konawe Selatan, masyarakat serta berbagai pihak lainnya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap kelestarian ekosistem pesisir dan laut lainnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada terumbu karang. Pada beberapa wilayah di Konawe Selatan, keberadaan terumbu karang sudah sangat langka. Beberapa lokasi yang dahulu sangat padat terumbu karangnya

sekarang praktis sudah tidak ada. Data hasil survey tahun 2005 diperkirakan kerusakan terumbu karang sudah mencapai 40-50%. Seperti halnya pada hutan mangrove, kondisi ini juga membutuhkan penanganan serius.

Sementara itu padang lamun, seiring dengan semakin kritisnya hutan mangrove di kawasan pesisir, juga turut berpengaruh pada kondisi padang lamun secara keseluruhan. Pada beberapa lokasi di Konawe Selatan, ditemukan padang lamun yang sudah mati atau tertimbun lumpur. Data hasil survey tahun 2005 menunjukkan terumbu karang yang sudah mati atau hilang sudah mencapai sekitar 50-60%. Hilangnya padang lamun ini akan turut berpengaruh terhadap populasi ikan yang hidup dan mencari makan di areal padang lamun. Sehingga hal ini pula perlu diupayakan pelestariannya dengan segera bersama dengan upaya pelestarian sumber daya pesisir dan laut lainnya secara terintegrasi dan terpadu.



Sumber : Nasaruddin, 2005

Gambar 18. Kondisi hutan mangrove dilihat dari kejauhan

3.2.5. Hilangnya Beberapa Jenis *Biodiversity*

Keragaman hayati (*Biodiversity*) adalah istilah untuk keragaman semua bentuk kehidupan di muka bumi yang mencakup manusia, hewan, tumbuhan, jasad renik, beserta gen atau pembawa sifat keturunan yang terkandung didalamnya yang ditujukan baik pada tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem.

Keragaman hayati perlu dilestarikan karena dua alasan, yaitu: (1) untuk mendukung proses pembangunan secara berkelanjutan; (2) adanya tanggung jawab moral, yaitu pengakuan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk hidup. Sesuai kodratnya, manusia adalah khalifah (pemimpin) di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dan keragaman hayati di dalamnya.

Data potensi keanekaragaman hayati yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan cukup tinggi baik untuk flora maupun fauna. Hal ini dapat dilihat dari beberapa laporan potensi keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) dan Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo dan Tanjung Peropa. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa di TNRAW terdapat sekitar 233 jenis fauna (meliputi 24 mamalia, 190 jenis burung, 7 jenis reptil dan 12 jenis ikan air tawar). Sedangkan fauna di Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo dan Tanjung Peropa tercatat sekitar 114 jenis (meliputi 21 jenis mamalia, 91 jenis burung, dan 2 jenis reptil). Jenis flora tercatat sekitar 425 jenis. Dari jumlah tersebut di TNRAW ditemukan sebanyak 341 jenis dan di SM Batikolo dan Tanjung Peropa ditemukan sebanyak 166 jenis.

Namun demikian akibat aktivitas manusia dan kegiatan pembangunan menyebabkan terganggunya kondisi ekosistem yang berakibat pada hilangnya/berkurangnya keragaman hayati (*Biodiversity*). Aktivitas yang paling erat berkaitan dengan hal tersebut adalah kegiatan pertanian dan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, perusakan habitat, pencemaran, dan adanya konversi habitat alam kepenggunaan lain.

Kerusakan habitat merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dan dapat menyebabkan kepunahan sebagian besar spesies, terutama spesies endemik yang mempunyai daya adaptasi rendah. Pengrusakan habitat dapat terjadi akibat adanya kegiatan-kegiatan yang dapat merubah habitat secara langsung seperti penebangan hutan di kawasan lindung menyebabkan berkurangnya Anoa, penebangan hutan bakau disepanjang pantai Kolono, moramo, Tinanggea dan pengrusakan terumbu karang atau dapat terjadi secara tidak langsung akibat pencemaran

perairan berupa sedimentasi dari darat melalui sungai-sungai, ledakan nutrien, perubahan suhu dan kadar garam.

Kawasan pesisir di Konawe Selatan praktis tidak ada yang dilindungi, kecuali pada kawasan pesisir Pulau Hari yang termasuk dalam kawasan SMS Tanjung Peropa. Konawe Selatan juga memiliki kawasan lahan basah (*wet land*) di antaranya di bagian hilir Sungai Roraea dan Sungai Sena serta di bagian hilir Sungai Lanowulu yang sebagian besar termasuk dalam kawasan TNRAW. Lahan basah ini ditumbuhi berbagai tumbuhan khas lahan basah seperti alga, jamur, tanaman merambat. Dalam kawasan ini pula dihuni oleh berbagai species seperti burung, amphibi, reptil dan mamalia, kupu-kupu dan berbagai jenis ikan air tawar.

Di antara tumbuhan yang disebutkan di atas yang paling terkenal adalah bunga teratai yang banyak terdapat di TNRAW. Tumbuhan ini sangat cantik terlihat mengapung di atas air. Sehingga banyak penduduk yang berkunjung ke TNRAW menyempatkan untuk mengambil gambar atau berpose dengan latar belakang bunga teratai. Populasi bunga teratai ini cukup banyak sehingga apabila dibiarkan tumbuh terus menerus akan menutupi permukaan rawa di TNRAW. Hal ini sebagaimana nampak pada beberapa bagian permukaan rawa. Selain tumbuhan bunga teratai ini terdapat pula pakis dalam berbagai jenis serta tumbuhan air tawar lainnya. Secara umum kondisi tumbuhan air ini masih sangat baik.



Sumber : BKSDA Sultra, 1994.

Gambar 19. Tumbuhan bunga teratai di TNRAW (Doc. BTNRAW)

Sementara itu, binatang mamalia yang paling menarik yang hidup dalam kawasan lahan basah di TNRAW dan di tempat-tempat lainnya di Konawe Selatan adalah rusa (*cervus timorensis*). Pada dekade 1990-an, populasi mamalia ini masih cukup banyak, tetapi sekarang ini setelah terjadi perburuan liar besar-besaran pada kurun waktu 2000-2003 praktis kawanan rusa yang dahulu sangat banyak itu sudah punah. Sekarang ini yang ditemukan tinggal satu dua ekor saja yang berkeliaran, khususnya di dalam TNRAW.



Sumber : Opwal, 2005

Gambar 20. Jenis-jenis Fauna yang terdapat di TNRAW dan SM Tanjung Batikolo dan Tanjung Peropa

(Atas dari kiri : Monyet - *Macaca* sp.; Anoa – *Bubalus depressicornis*;
Bawah dari kiri : Tarsius - *Tarsius spectrum*; rangkong – *Rhyticeros cassidix*. Ular piton - *Python reticulatus*)

3.3. Kegiatan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Menyadari bahwa modal utama pembangunan adalah kekayaan alam, maka kegiatan penanggulangan kerusakan SDA dan LH di Konawe Selatan perlu dan terus diupayakan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Upaya untuk merehabilitasi SDA yang telah rusak atau mengalami penurunan terus dilakukan secara bertahap dan simultan melalui beberapa program dan kegiatan.

(1) Kebijakan Pemerintah

Berbagai kebijakan pemerintah telah dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan antara lain:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan telah dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi tentang arti penting dan manfaat hutan bagi manusia. Selain kegiatan penyuluhan terpadu yang diprakarsai oleh Kantor Lingkungan Hidup Konawe Selatan dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk aparat penegak hukum dan PPNS, kegiatan tersebut juga dilakukan oleh petugas penyuluh kehutanan yang mempunyai wilayah kerja di daerah tersebut.
2. Upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan juga telah diupayakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara langsung melalui pengembangan kegiatan Sosial Forestry. Tujuan kegiatan ini disamping untuk meningkatkan kegiatan masyarakat agar SDA di sekitarnya terhindar dari gangguan, juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap hutan.
3. Upaya pemulihan kawasan hutan yang berada dalam kondisi kritis dan meningkatkan produktivitas hutan, di samping dilakukan kegiatan reboisasi, juga dilakukan kegiatan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan pada lahan-lahan milik masyarakat dilakukan kegiatan penghijauan dengan jenis-jenis yang disukai oleh masyarakat dan mampu menambah penghasilan masyarakat.

Kegiatan pengembangan HTI secara swakelola oleh Dishut Konawe Selatan dengan jenis jati sampai tahun 2003 yaitu 497 Ha. Kegiatan pembangunan HTI tersebut diarahkan pada kawasan-kawasan hutan yang tidak produktif atau pada kawasan-kawasan hutan dengan vegetasi alang-alang atau semak belukar. Kegiatan tersebut di

samping merupakan kegiatan rehabilitasi lahan juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan HTI, yaitu sebagai tenaga kerja. Kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dilakukan melalui pemberian kesempatan menanam tanaman pangan di lokasi sampai tanaman pokok cukup besar dan sudah menutupi lahan dan hal tersebut dapat berlangsung selama lebih kurang 2 tahun. Kegiatan pembuatan HTI juga dimaksudkan untuk menyiapkan bahan baku kayu jenis pertukangan guna memenuhi kebutuhan industri yang ada di daerah maupun masyarakat lokal.

4. Berkaitan dengan sumber daya pesisir dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laut dan wilayah pesisir secara lestari juga telah dilakukan berbagai upaya penyuluhan serta bimbingan teknik budidaya perairan dan mangrove. Selain itu juga dilakukan studi banding ke berbagai daerah yang telah berhasil melakukan kegiatan pelestarian wilayah pesisir secara mandiri dengan menginstruksikan tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemuda.
5. Pembuatan tanggul pada beberapa sungai yang mengalami erosi tebing
6. Mengimplementasikan kebijakan tentang perlunya perusahaan memiliki studi kelayakan lingkungan seperti AMDAL, UKL dan UPL. Di antaranya yang telah disyaratkan memiliki dokumen UKL dan UPL adalah Industri Sawmil di Kecamatan Lainea dan SPBU di Desa Potoro Kecamatan Andoolo.
7. Pembangunan sarana fisik drainase (got) pada sisi kiri kanan jalan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah meluapnya air ke permukaan jalan raya.
8. Pembangunan sarana fisik Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan pengadaan mobil pengangkut sampah oleh Pemda Konawe Selatan.

(2) Respon Masyarakat

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terlepas dari penggunaan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini kerap menimbulkan perubahan-perubahan. Meskipun telah dimanfaatkan dan terdapat indikasi perubahan terhadap kondisi lingkungan, namun apabila keberadaan sumber daya alam dirasakan masih melimpah ruah, maka masyarakat sebagai pemanfaat belum memberikan reaksi terhadap kondisi sumber daya alam tersebut. Ketika keberadaan sumber daya alam tersebut dirasakan semakin langka dan telah menimbulkan banyak perubahan terhadap lingkungan hidup, maka munculah reaksi/respon dari masyarakat (pemanfaat). Meskipun demikian sebagian masyarakat cenderung belum memberikan respon yang berarti terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup terutama kelompok masyarakat yang bekerja di bidang usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam.

Pemerintah mengalami kesulitan dan keterbatasan fasilitas dalam upaya memberikan sanksi terhadap tindakan pelanggaran tersebut. Hal ini dapat dilihat dari berbagai komponen pengelolaan seperti: aspek peraturan dan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas penunjang lainnya antara lain: sarana transportasi dan komunikasi. Dalam hal sarana komunikasi, kadang para perusak lingkungan memiliki alat canggih dibanding pemerintah sehingga cukup sulit untuk mengatasinya. Kadang aparat menjadi motor dan sekaligus agen perusak lingkungan sehingga masih perlu diperlukan proses untuk memunculkan keteladanan sebagai panutan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan.

Dari aspek masyarakat tradisional pertimbangan kelestarian lingkungan bukan merupakan perhatian utama dibandingkan dengan aspek ekonomi dan sosial jangka pendek. Sebaliknya bagi pengusaha eksploitasi sumber daya alam masih memisahkan komponen lingkungan dengan keuntungan perusahaan jangka panjang. Meskipun masyarakat

mampu mengembangkan sistem perhutanan sosial atau tanaman campuran pada sebidang lahan atau pekarangannya lebih banyak disebabkan oleh karena faktor kebiasaan atau faktor budaya setempat.

Sehubungan dengan peningkatan kerusakan, pelanggaran hukum lingkungan dan pencemaran dalam tahun-tahun terakhir ini, serta untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang, setiap aktor pembangunan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

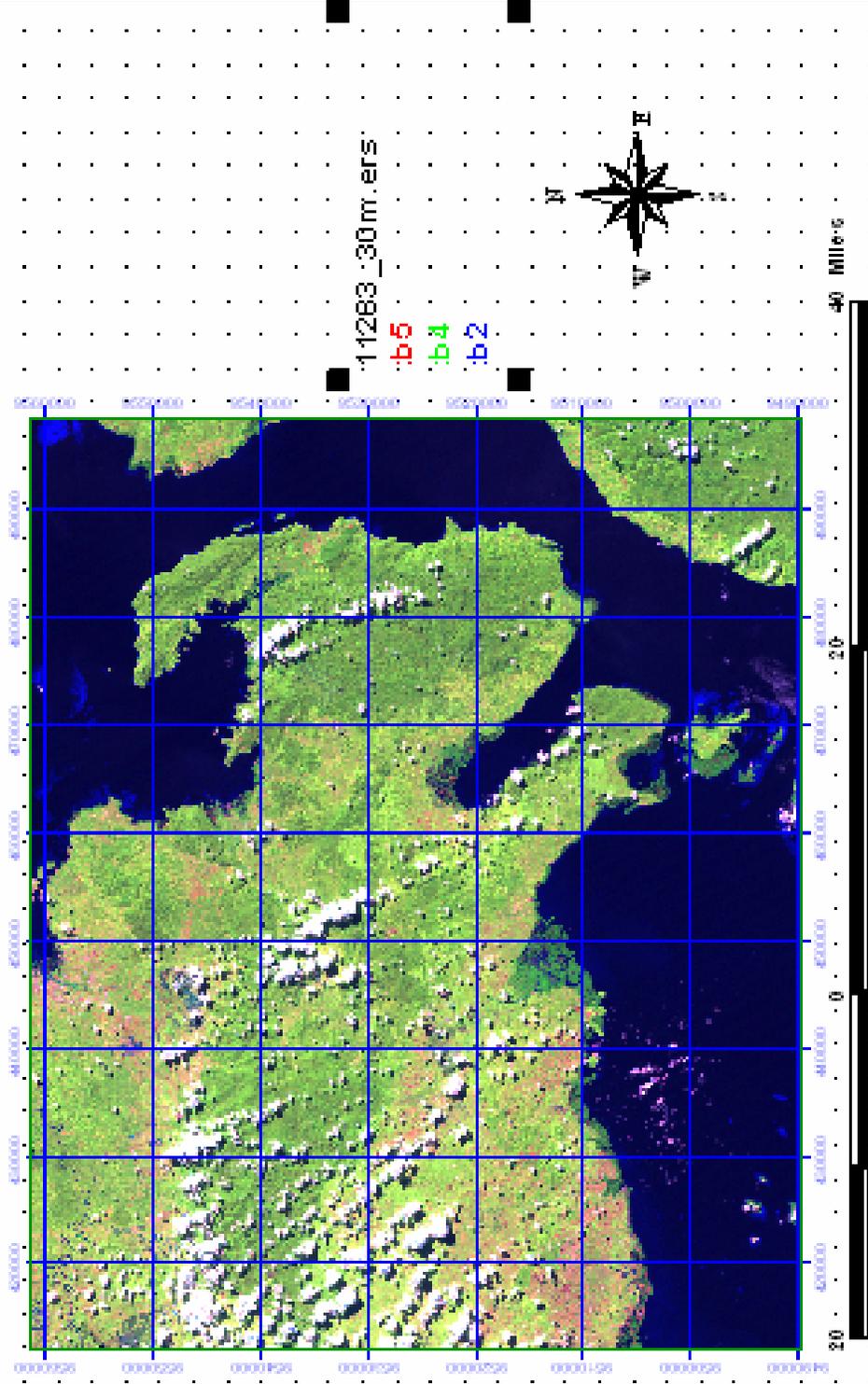
1. Semakin menurunnya populasi hutan alam akibat kebijakan pengelolaan hutan yang salah kaprah selama ini, diperlukan perubahan paradigma dan praksis kebijakan pengelolaan hutan yang dapat menjamin kepentingan ekonomi dan ekologis semua pihak, termasuk sumber daya hutan itu sendiri.
2. Berubahnya luas kawasan dan vegetasi hutan akibat berbagai kegiatan eksploitasi SDH diperlukan studi mendalam untuk mengetahui potensi SDH yang tersisa serta penyusunan kembali TGHK di Konawe Selatan.
3. Maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) memerlukan upaya pemberantasan yang maksimal, melalui penataan dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten dan tidak diskriminatif.
4. Semakin kritisnya ketersediaan air tawar untuk keperluan manusia baik langsung maupun tidak langsung, memerlukan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air terpadu (*one management for one watershed*) dengan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) serta mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya air, disamping upaya penghematan air secara sungguh-sungguh.
5. Melihat tingkat kerusakan pesisir dan laut yang semakin meluas dengan tingkat abrasi yang tinggi, maka perlu dilakukan upaya pembudidayaan mangrove, konservasi serta penyelamatan terumbu karang, padang lamun, dan sumber daya laut lainnya secara konsisten dengan melibatkan peran aktif berbagai lapisan masyarakat.

6. Dalam rangka mencegah dan mengurangi pencemaran udara, perlu dibuat kebijakan penataan kendaraan bermotor, kegiatan konstruksi dan kegiatan industri untuk mencegah timbulnya polusi udara yang bersumber dari debu, asap dan kebisingan.
7. Penegakan peraturan perundang-undangan tentang setiap jenis usaha/kegiatan yang diperkirakan memberikan dampak besar dan penting, harus disertai dengan studi lingkungan, sebagai bagian dari studi kelayakan usaha dan keluarnya izin usaha.
8. Perlu penyusunan peraturan daerah yang berkenaan dengan sempadan sungai dan penggunaan air tanah dalam untuk kegiatan-kegiatan produksi yang membutuhkan air bersih dalam volume besar seperti kegiatan industri.
9. Perlu eksisnya/adanya lembaga koordinatif (baik berupa badan khusus, peraturan maupun program bersama) antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan Kabupaten disekitarnya, utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang lintas administratif, seperti DAS dan kawasan hutan;
10. Perlu dioptimalkannya pengelolaan sampah industri dan rumah tangga, dengan menata sistem pengelolaan limbah padat industri/rumah tangga yang menekankan pada aspek-aspek penanganan sendiri maupun kelompok;
11. Mengembangkan sarana/forum kerjasama yang sifatnya mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; melalui kelompok "sadar lingkungan" ditingkat Kelurahan, penyuluhan lingkungan melalui radio dan media cetak, hingga kegiatan seperti gerakan cinta alam yang dilaksanakan oleh generasi muda, dan sebagainya.
12. Pengoptimalan potensi masyarakat dan pelibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

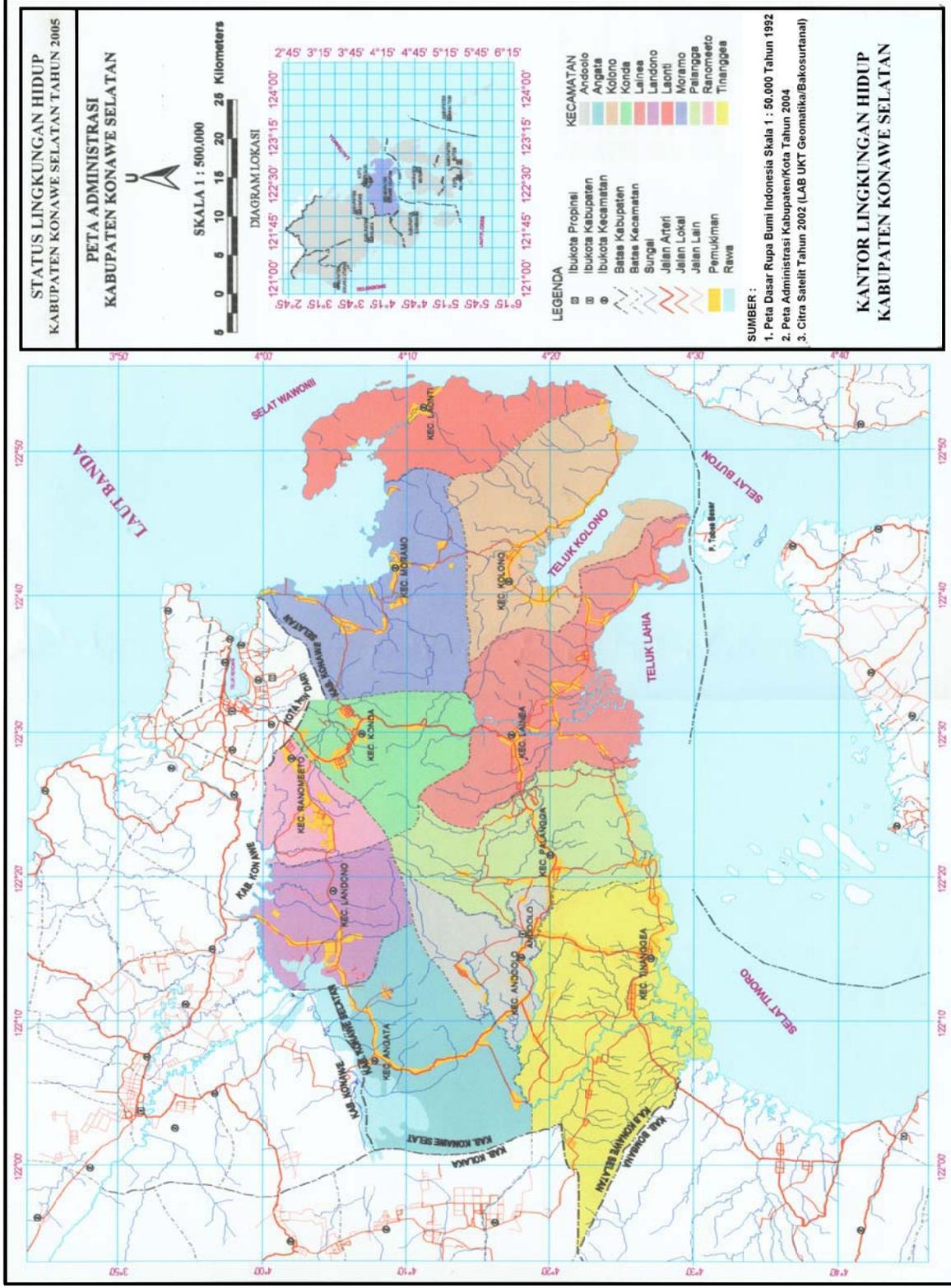
1. Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka Tahun 2004. Andoolo, BAPPEDA Konawe Selatan dan BPS Konawe.
2. Kecamatan Lainea Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
3. Kecamatan Palangga Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
4. Kecamatan Tinanggea Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
5. Kecamatan Andoolo Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
6. Kecamatan Angata Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
7. Kecamatan Landono Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
8. Kecamatan Ranomeeto Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
9. Kecamatan Konda Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
10. Kecamatan Moramo Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
11. Kecamatan Laonti Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
12. Kecamatan Kolono Dalam Angka Tahun 2003. Andoolo, BPS Konawe.
13. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Konawe Selatan Tahun 2004-2009. Andoolo, Pemerintah Konawe Selatan.
14. Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Konawe Selatan Tahun 2004 – 2009. Andoolo, BAPPEDA Konawe Selatan.
15. Laporan Studi Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2004. Kendari, BPEALDA Sultra.
16. Laporan Studi Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2005. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Indonesia.
17. Laporan Penelitian Mencari Model Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Konawe Selatan. Kendari, Damsid, Dkk tahun 2004.
18. Kawasan Konservasi di Sulawesi Tenggara. Kendari, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sultra dan Ditjen PKA tahun 1994.

Penutupan Lahan Status Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan

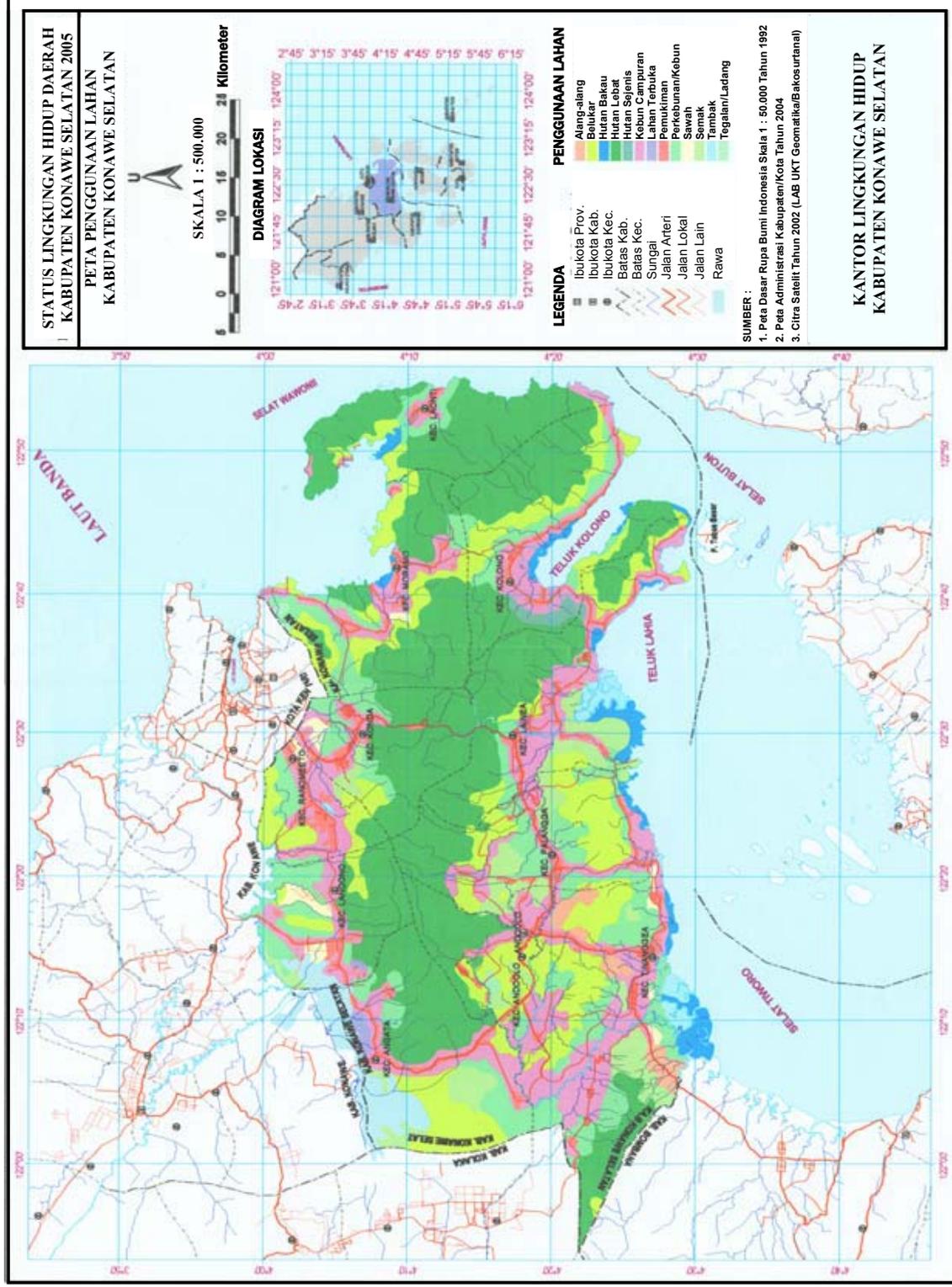


Lampiran 1. Citra Land Sat Kabupaten Konawe Selatan 2003

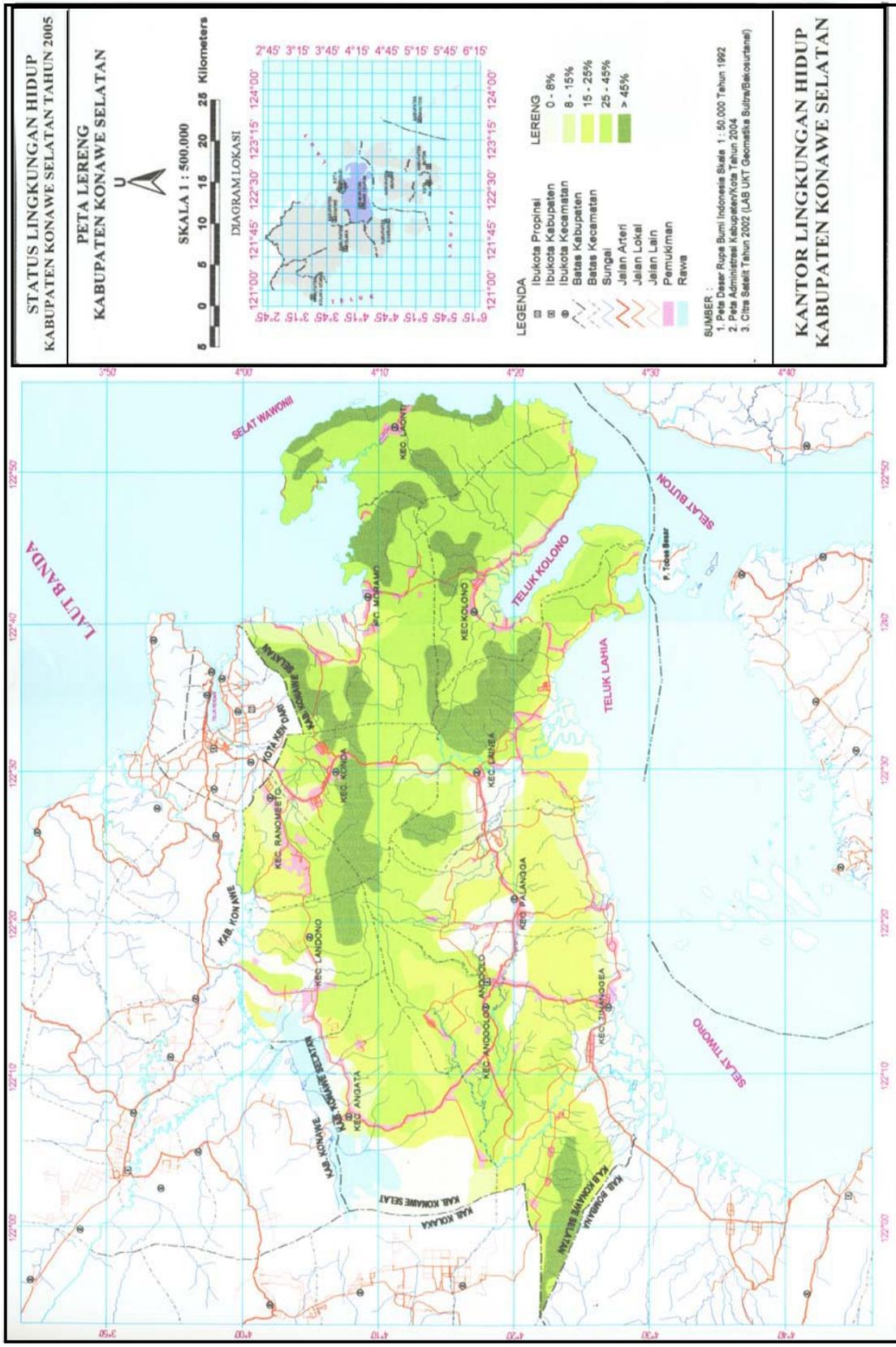
LAMPIRAN 2. PETA ADMINISTRASI KAB. KONAWE SELATAN 2005



LAMPIRAN 3. PETA PENGGUNAAN LAHAN KAB. KONAWE SELATAN 2005



LAMPIRAN 4. PETA LERENG KAB. KONAWE SELATAN 2005



LAMPIRAN 5. PETA JENIS TANAH KAB. KONAWA SELATAN 2005

